



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 18 (Delapan Belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Himbara;
2. Perbanas;
3. Asbanda;
4. Asbisindo;
5. Perbina.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 25 November 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A.
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Proyeksi Keuangan Perbankan Nasional Tahun 2020
Hadir : 1. KETUA UMUM HIMBARA (SUNARSO)
2. WAKIL KETUA UMUM PERBANAS (TIGOR M. SIAHAAN)
3. DIREKTUR EKSEKUTIF ASBANDA (WIMRAN ISMAUN)
4. KETUA UMUM ASBISINDO (PANDJI P. DJAJANEGARA)
5. KETUA UMUM PERBINA (BATARA SIANTURI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.):

...(suara tidak terekam) HIMBARA, ASBISINDO, ASBANDA, PERBANAS, PERBINA dan Bapak-bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini, karena belum kuorum saya skors 5 menit kemudian kita mulai 5 menit kemudian langsung kita mulai ya Pak ya. Ini biasanya kalau hari Senin memang mungkin pada di daerah, tapi tidak apa-apa kita ...(suara tidak jelas)

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

KETUA RAPAT:

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shaloom,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang terhormat saudara Ketua Umum Himbara beserta jajarannya, Pak Sunarso hadir ya Pak ya,

Yang terhormat saudara Ketua Umum Perbanas beserta jajarannya, Pak Tigor Siahaan,

Yang terhormat saudara Ketua Asbisindo beserta jajarannya, Pak Tony,

Yang terhormat saudara Ketua Asbanda beserta jajarannya, Pak Imran,

Yang terhormat Ketua Umum Perbina beserta jajarannya, Pak Batara Sianturi,

Yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI, dan Hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat, Daftar Hadir Rapat telah ditandatangani oleh 8 Anggota, 4 Fraksi, meskipun belum kuorum mungkin kita jalan saja, pada waktu nanti kita mengambil keputusan, oh ya, sudah kuorum kalau begitu sudah ada Pak Misbakhun, ini Pak Dolfie, sudah ada Pak ini sudah. Inti-intinya ini saja Bapak sama itu mewakili semuanya.

Izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Saudara Ketua Umum Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina, Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati,

Mengawali Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Ketua Umum Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina pada hari ini adalah Proyeksi Keuangan Perbankan Nasional Tahun 2020.

Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, perbankan sudah selayaknya menjadi unjuk tombak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini harus tercermin dalam jumlah kredit yang diberikan kepada sektor ril sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dalam mencapai target penyaluran kredit tersebut, perbankan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar *non-performing loans* dapat tetap terjaga dari waktu ke waktu. Oleh karenanya Komisi XI DPR RI berharap agar pihak-pihak bank dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan pada tahun 2020.

Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan realisasi pajak...(suara tidak jelas)...dan perbankan Anggota Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina selama 5 tahun terakhir serta rencana pada tahun 2020. Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui mengenai realisasi hutang perusahaan dan pihak ketiga perbankan Anggota Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina...(suara tidak jelas)...realisasi selama 5 tahun terakhir serta rencana tahun 2020. Selain itu Komisi XI DPR RI juga ingin mendengarkan Laporan Penyaluran Kredit Usah Rakyat oleh perbankan Anggota Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina. Bagaimana evaluasi terhadap program Kredit Usaha Rakyat selama 5 tahun terakhir, serta saran-saran apa saja bagi perbankan program KUR tersebut tahun 2020. Komisi XI DPR RI juga ingin mendengarkan evaluasi Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas secara keuangan sejak lembaga tersebut didirikan serta bagaimana saran untuk perbaikan tahun 2020. Selain itu Komisi XI DPR RI juga ingin mendengarkan evaluasi terhadap regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dan Bank Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya dan apa saran regulasi yang harus diperbaiki pada tahun 2020.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ketua Umum Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina untuk menyampaika penjelasannya. Mungkin karena mungkin waktunya agak terbatas, mungkin secara *highlight* saja Pak, secara garis besar, kemudian setelah itu baru pendalaman dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Untuk itu kami mulai persilakan dari Himbara dulu kami persilakan Pak.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi XI DPR RI dan seluruh jajaran di Komisi XI para Anggota dan Hadirin yang hadir pada acara pagi hari ini.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini dan kami mewakili Himbara akan menyampaikan kira-kira kinerja dari Himbara dan juga apa yang akan aspirasinya yang ingin dicapai tahun depan.

Pertama mungkin izinkan kami menyampaikan bahwa situasi global dulu bahwa di tahun 2020 kita perkirakan bahwa perekonomian dunia mungkin masih konservatif dan tetapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang masih sangat terpengaruh oleh *trade war*. Kemudian motor penggerak utama GDP global itu masih...(suara tidak jelas)...dan terutama di negara-negara maju dan Tiongkok, oleh karena itu pertumbuhan masih akan mengandalkan di negara yang sedang berkembang seperti Asean...(suara tidak jelas)...,termasuk di dalamnya pasti Indonesia.

Kemudian projek ekonomi Indonesia 2020 menurut pandangan Himbara adalah ada beberapa faktor yang akan berpengaruh. Satu, turunnya suku bunga yang diharapkan mendorong investasi. Yang kedua, inflasi kami perkirakan bahwa masih bisa di-*maintenance* dalam stabil rendah dan kemudian...(suara tidak jelas)...dari obligasi negara masih dianggap kompetitif dan menarik. Kemudian juga yang perlu kita perhitungkan bahwa harga ekspor komoditi primer Indonesia masih tertekan dan cenderung rendah dan turun. Masih terjaganya konsumsi sebagai salah satu *driver* utama pertumbuhan GDP.

Oleh karena itu Himbara kira-kira membuat asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di 2020 itu kita rangkum dari 2017, 2018, dan 2019. Di 2020 kita memproyeksikan bahwa GDP *growth* kita sekitar 5 sampai 5,2% dan inflasi di *maintenance* dalam tingkat level yang rendah, kita perkirakan 3,1 sampai 3,6. Nilai tukar 14.200 sampai 14.600, dan kemudian 7 day reverse repo rate itu kita perkirakan di kisaran 4,5 sampai 75 dan pertumbuhan kredit yang menjadi konsen dari pada pembicaraan kita hari ini juga kita perkirakan bahwa kredit masih bisa tumbuh di industri sekitar 10 sampai 12%, sedangkan simpanan hanya tumbuh kita perkirakan antara 7,5 sampai 10%.

Demikian kira-kira asumsi-asumsi yang kita akan gunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2020.

kemudian kalau kita lihat bahwa kinerja sampai quarter 3 2019, bank-bank Himbara mempertahankan kinerja yang baik di atas rata-rata industri. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas itu tren kredit industri dan Himbara. Yang biru itu adalah industri sedangkan yang merah itu adalah kredit Himbara. Demikian juga simpanan, bahwa

tren simpanan industri dan Himbara digambarkan oleh yang bawah itu yang biru dan yang merah, dan kemudian perlu diketahui bahwa *market share* untuk kredit itu total Himbara itu menguasai *market share* 42,4%, industri 57,6 sisa di luar Himbara. Kemudian untuk simpanan, Himbara menguasai *market share* 41,6%, kemudian sisanya industri itu 58,4%. Jadi sedemikian signifikan pengaruh dari Himbara di dalam penguasaan *market share* ini.

Kemudian kinerja Himbara 2019 dan kira-kira untuk tahun 2020. Kalau kita lihat bahwa di situ perlu saya sampaikan Pak bahwa Himbara datang saya sendiri dari BRI Sunarso, dan kemudian nanti akan kalau ada hal-hal yang menyangkut BNI ada Pak Riko Budidarmo, kemudian dari Mandiri ada Pak Panji tadi saya lihat Pak Panji, dan dari BTN Pak Oni.

Baik, mungkin saya sampaikan bahwa untuk BRI Pak pertumbuhan asetnya selama 2019 sampai September itu aset tumbuh 10,1% dan kemudian aspirasi kita nanti di 2019 sekitar 9-10% untuk menuntaskan di akhir tahun 2019 dan di tahun depan kita perkirakan aset kita akan tumbuh sekitar 9 sampai 10%. Kemudian kredit, sekarang sampai September memang tumbuh 10,9 dan kemudian kira-kira nanti akhir tahun kita akan perkirakan masih bisa tumbuh antara 9 sampai 10% dan aspirasinya tahun depan 10 sampai 11%. Sedangkan pertumbuhan simpanan sampai September tumbuh 10,1% dan kemudian aspirasi kita akhir tahun nanti kita bisa tutup dengan pertumbuhan antara 10 sampai 11%. Demikian juga di 2020 pertumbuhan simpanan kita mungkin kita perkirakan di 10 sampai 11%. Rasio NPL di 2019 sampai September 2,9, itu *bank only*, dan kemudian kita tahun depan kita menurunkan ini ke kisaran 2,4 sampai 2,5%.

Sedangkan Mandiri saya sampaikan saja langsung ya, Mandiri itu pertumbuhan asetnya akan berkisar antara 6 sampai 8% itu di 2020, September kemarin tumbuh 7,9%. Pertumbuhan kreditnya sampai September 6,4% dan kemudian aspirasinya nanti akan tumbuh 10 sampai 11% 2020. Demikian juga simpanan sampai September tumbuh 6,4% dan kemudian tahun depan diperkirakan mereka ingin mencapai 8 sampai 9%. Untuk NPL sampai September bisa dikendalikan di 2,61% dan kemudian aspirasinya tahun depan akan membaik menjadi 2,4 sampai 2,5%.

BNI pertumbuhan asetnya sampai September 6,3% tetapi tahun 2020 ingin 9 sampai 11%. Kredit BNI tumbuh saya kira diantara semua bank Himbara kredit BNI sampai September tumbuh paling tinggi 14,4% dan kemudian tahun depan mengaspirasikan untuk tumbuh 11 sampai 13%. Simpanan sampai September tumbuh 5,5% dan kemudian aspirasinya tahun depan 12 sampai 14%. NPL terkelola dengan baik, di mana sampai September 1,8% dan di tahun depan diperkirakan 1,8 sampai 2% saja.

Sedangkan BTN asetnya tumbuh sangat baik di 2019 sampai September tumbuh 16,1%, tetapi tahun depan mungkin akan fokus ke lebih ke kualitas aset dengan pertumbuhannya diperkirakan 5 sampai 7%. Kemudian pertumbuhan kredit sampai September tumbuh 16,8% dan tahun depan memperkirakan akan tumbuh 5 sampai 7% saja. Kemudian simpanan sampai September tumbuh 18,1%, tahun depan ingin tumbuh 7 sampai 9%. Kemudian NPL dikelola di level 3,5% dan tahun

depan nampak bahwa ingin memperbaiki kualitas aset, di mana ingin NPL-nya sekitar 2,7 sampai 2,9%.

Selanjutnya program pemerintah yang dijalankan oleh bank-bank Himbara. Pertama, saya sampaikan bahwa ada program dari Kementerian Sosial yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) itu totalnya nilainya Tiga Puluh Dua koma Enam Triliun yang disalurkan lewat Himbara dan kemudian itu menyangkut masalah Sembilan koma Enam Juta keluarga ya dan kemudian untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2019 ini juga dari Kementerian Sosial nilainya Sebelas koma Satu Triliun dan meliputi Empat Belas koma Satu Juta Keluarga. Kemudian untuk Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 ini dari Kementerian Koordinator Ekonomi total yang disalurkan melalui Himbara Seratus Sembilan Belas koma Lima Triliun dan menyangkut Empat Tiga koma Tiga Empat Juta debitur.

Kemudian penyaluran program kemitraan ini berdasarkan Permen Kementerian BUMN Menteri BUMN dasarnya, tahun 2019 total Himbara menyalurkan program kemitraan ini Tiga Ratus Tiga Puluh Dua koma Lima Miliar. Sedangkan penyaluran bina lingkungan berarti ini PKBL masih dalam lingkup Kementerian BUMN, PK-nya Tiga Tiga Dua koma Lima, BL-nya Bina Lingkungannya Empat Ratus Sembilan koma Sembilan Miliar, dan kemudian ada pencapaian realisasi rumah subsidi tahun 2019, terutama ini BTN, jadi itu sampai mencapai 617.726 unit rumah. Sedangkan kontribusi langsung kepada APBN pada APBN melalui dua hal tentunya, melalui pajak yang dibayar dan kemudian dan dividen. Setoran pajak BRI 2018 itu Tujuh Belas koma Enam Triliun dan kemudian dividen Tujuh koma Lima Triliun kepada negara dan di 2019 pajak yang kita hitung itu sampai September tentunya berdasarkan laba sampai September, di mana laba kita sampai September Dua Puluh Empat koma Delapan Triliun, maka pajak yang disetor Tiga Belas koma Empat Triliun sampai September. Dividen kita perkirakan Sembilan koma Dua Triliun.

Mandiri telah menyetor pajak 2018 Sebelas koma Sembilan Triliun. 2019 kita perkirakan sampai September Ketua Sepuluh koma Lima Triliun dan dividen 2018 setor Lima koma Enam Triliun, 2019 kita perkirakan Enam koma Delapan Triliun.

Demikian juga BNI setor pajak Tujuh koma Sembilan Triliun 2018 dan 2019 setor pajak Tujuh koma Satu Triliun dan kemudian dividen dibayarkan 2018 itu Dua koma Sembilan Triliun dan 2019 diperkirakan Dua koma Tiga Triliun itu sampai September berdasarkan kinerja sampai September.

BTN juga demikian, menyetor pajak selama tahun 2018 Dua koma Lima Triliun dan 2019 sampai September Dua Triliun. Kemudian dividen Nol koma Empat Triliun di tahun 2018 dan di tahun 2019 diperkirakan Nol koma Tiga Triliun. Total Himbara itu diperkirakan 2019 ini akan setor pajak Tiga Puluh Tiga Triliun dan dividen Delapan Belas koma Enam Triliun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi Pak.

Saya ingin tanya, saya ingin tahu *breakdown* mengenai setoran pajak ini Pak. Mohon izin Pak Ketua, karena pajak ini kalau kita lihat mana yang merupakan setoran PPh korporasi, mana yang merupakan setoran PPh Pasal 21, karena apa, dan juga yang dipotong melalui mekanisme bunga dan sebagainya, karena kalau kita melihat setoran pajak ini, sebagai korporasi itu kan berbeda dengan setoran PPh Pasal 21 ini adalah karyawan yang membayar, yang kebetulan bekerja di dan kemudian mengenai bunga bank, bunga bank ini kan dipotong oleh Bank dan itu adalah pemilik simpanan dan ini yang harus dibedakan. Kita harus mendetilkan ini supaya kita tahu *perform* sumbangan Himbara kepada negara ini seperti apa. Jadi harus detil Pak, lain kali minta tolong didetilkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan lanjutkan Pak, silakan Pak lanjutin.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Baik Pak.

Saya kira mungkin itu sudah ada rinciannya, memang ini adalah total Pak Mibakhun ini total, dan ini nanti akan kami berikan rinciannya secara tertulis ya dan saya akan lanjutkan bahwa itu kira-kira kontribusi terhadap APBN dan benar sekali yang disampaikan Pak Misbakhun bahwa memang harus dirinci mana pajak yang benar-benar dibayar oleh korporasi karena laba dari laba, mana pajak yang dibayarkan karena korporasi sebagai pemotong pajak. Saya kira mungkin itu nanti yang akan kami sampaikan.

Saya kira itu Pak presentasi dari Himbara. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Himbara atas penyampaian. Selanjutnya kami persilakan Perbanas, Pak Tigor Siahaan.

WAKIL KETUA PERBANAS (TIGOR M. SIAHAAN):

Terima kasih Pak.

Selamat pagi.

Bapak Pimpinan Rapat Komisi XI dan para Anggota Komisi XI.

Kami pagi ini dibantu dengan beberapa pengurus dari Perbanas Pak Taswin Zakaria sebelah saya, Ibu Afiliani dan juga Ibu Anita Faizal dan Bapak pengurus lain dari Perbanas. Mungkin kita langsung saja ya Pak.

Saya akan coba cukup singkat karena banyak pembahasannya dan mungkin nanti pendalamannya nanti di tanya jawab. Jadi secara global juga mungkin similar hampir sama dengan Pak Sunarso katakan tadi bahwa sudah kita ketahui semua bahwa ekonomi dunia melambat dan bahkan beberapa negara sudah mengalami resesi. Dari segi suku bunga juga memang trennya kalau kita lihat memang di awal tahun lalu adalah kenaikan suku bunga di Fed, tapi ...(suara tidak jelas) menjadi penurunan, tapi kita merasa bahwa penurunan suku bunga di Fed pun sudah tidak akan terlalu banyak lagi dari sekarang.

Trade war ini merupakan tanda tanya yang besar bisa *opportunity* bisa *challenge*, tetapi kemungkinan ini akan terus berlangsung dan stimulus lanjutan dari Tiongkok akan kita antisipasi atas berdasarkan *trade war* ini dan apa akibatnya dengan kita karena kita adalah negara yang banyak berdasarkan dengan komoditas, kita merasa mungkin ada kemungkinan ...(suara tidak jelas) karena harga sudah turun secara gradual dalam 5 tahun terakhir, tapi kami merasa secara *long term* dan *stelsel*-nya batu bara mungkin masih bisa tertekan karena batu bara itu di global economy yang ...(suara tidak jelas) ke *clean energy*, jadi mungkin akan ada tekanan yang secara struktural terhadap batu bara. Sementara CPO kita melihat dalam sebulan dua bulan terakhir sudah ada perbaikan jadi semacam *buffer* untuk Indonesia kita juga tahu ada masalah geopolitik di India dan Malaysia yang mungkin memberikan sedikit keuntungan untuk kita dan juga ada sedikit *upside* karena *swine flu* di Tiongkok di mana sepertiga dari *swine* di sana dan kebutuhan mereka dari soya itu di-*replace* dengan CPO, jadi ada kelonjakan dari import dari CPO untuk ke Tiongkok dan tentu saja karena di 20 policy yang kita harapkan akan terus menjadi *buffer* dari harga CPO kita.

Berikutnya dari segi domestik kita lihat bahwa alir modal tapi aliran modal masih secara portofolio ya, secara FDI mungkin lonjakannya belum terasa, tapi secara portofolio sudah naik dan kita ketahui ...(suara tidak jelas) dari portofolio tersebut karena rentangan jangka panjang dan menengah dari portofolio tersebut mungkin bisa dimediasi dari banyak ke portofolio yang keluar masuk. Dan kita juga tahu *shortfall* pajak akibatnya terhadap APBN dan ekonomi di dalam negeri.

Kita juga merasa bahwa konsumsi dan investasi ada pergerakan tapi masih sedikit melambat dibayangi dengan pertumbuhan dari PDB yang relatif stagnan. Kita juga mengetahui bahwa Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga, mungkin translasi dan transmisinya ke market itu mungkin akan berdampak lebih kelihatan lagi dalam 6 sampai 9 bulan karena ada ...(suara tidak jelas) Inflasi juga cukup terjaga dan kita melihat *current account deficit* cenderung lebih baik tapi kita juga melihat ini karena import yang turun plus minus juga Pak, karena import turun banyak bahan baku dan juga *potential machinery* yang turun yang sebenarnya mungkin terefleksi dari *demand* yang cukup stagnan.

Berikutnya kondisi perbankan, kita mengetahui bahwa pertumbuhan kredit masih ada cuma cukup melambat, tapi kita melihat lebih perlambatkan lagi dari DPK. Jadi ini mungkin sudah tahun kedua tahun ketiga bahwa pertumbuhan DPK di bawah dari pertumbuhan kredit, sehingga kita mengetahui bahwa LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dari perbankan secara industri sudah di sekitar 94-95%. Jadi kalau kita melihat likuiditas itu memang pengetatannya kerasa dan juga memang pertumbuhan kreditnya melambat, cuma lebih lambat lagi dari segi DPK-nya.

Perlambatan kita lihat hampir di semua sektor usaha. Tentu saja kalau infrastruktur dorongan infrastruktur yang selama ini di dalam 4-5 tahun kemarin mungkin memberikan dampak yang masih positif, tapi di sektor-sektor usaha lain kita merasakan perlambatannya dan kita merasa juga bahwa di pihak swasta perlambatannya itu lebih kentara dibandingkan dengan pihak-pihak dari BUMN, di mana swasta memilih *quick and easy* dan juga ada indikasi bahwa penahanan dari belanja dari pihak swasta itu.

Jadi dari segi Bank Indonesia kami rasa juga sudah tepat untuk menurunkan suku bunga, tapi dari masalah perinciannya bahwa *demand*-nya yang masih belum ...(suara tidak jelas) sampai sekarang.

Berikutnya apa yang akan menjadi dorongan, Bank Indonesia juga sudah menurunkan ...(suara tidak jelas) itu memberikan sedikit stimulus dari Dua Puluh sampai Tiga Puluh Triliun ke likuiditas dan juga mungkin kami memberikan rekomendasi bahwa bank-bank diberikan kesempatan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kita tahu bahwa misalnya sekarang ada peraturan bahwa hampir 20% dari portofolio tiap bank itu diharuskan ke UKM. Memang kita tahu bahwa UKM itu adalah segmen yang harus kita kembangkan akan tetapi mungkin porsinya setiap bank itu berbeda, karena ada bank yang seperti BRI Misalnya mungkin 20% kekecilan untuk BRI, akan tetapi untuk beberapa bank yang tidak terlalu paham di UKM, mungkin akan berbahaya kalau kita masukkan dia 20% di situ. Jadi mungkin kita merekomendasikan mungkin secara industri kita tentukan berapa sih yang masuk ke UKM, tapi tiap tahun mungkin porsinya bisa berbeda-beda.

Kita juga merekomendasikan stimulus di mana percepatan dari perbelanjaan itu biasanya itu diparuh kedua dari tiap tahun, kita ...(suara tidak jelas) bahwa alangkah baiknya bila sejak kuartal pertama percepatan dari pembelanjaan pemerintah itu sudah dilaksanakan sehingga mendorong stimulus ekonomi ke seluruh sektor. Kita juga merekomendasikan untuk meningkatkan belanja sosial pemerintah dan juga ada suara yang memberikan input bahwa menaikkan PPKP dapat memberikan daya beli yang lebih untuk masyarakat *specially* yang di pihak bawah.

Berikutnya juga untuk stimulus, kita merekomendasikan bagaimana pihak swasta dapat lebih keterlibatannya lebih dalam lagi untuk proyek-proyek infrastruktur kita tahu bahwa banyak sekali dari proyek-proyek infrastruktur dibiayai dengan perusahaan-perusahaan BUMN saya rasa itu bagus, tapi keterlibatan dari swasta kita harapkan bisa lebih untuk mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Yang kedua dari profiling pajak, yang mana kita dalam tanda kutip kita rekomendasikan ada sedikit pengampunan bagi pelaku usaha yang mungkin belum wajib pajak atau wajib pajak yang mengenai kena denda dan sebagainya untuk kesempatan kurang bayarnya itu secara gradual, cicil sehingga memberikan ekstensifikasi dari wajib pajak ini lebih besar lagi. Juga insentif pajak untuk industri yang berbasis ekspor, kita merekomendasikan untuk hal tersebut dan juga tentu saja reformasi birokrasi dan kemudahan perizinan untuk sektor-sektor yang kami rasa butuh investasi lebih lanjut.

Ya yang terakhir kita merasa perlunya ada *roadmap* yang disepakati oleh perbankan dan juga fintech, kita mengetahui bahwa lebih dari Seratus Juta masyarakat di Indonesia belum tersentuh industri perbankan, dan kami merasa bahwa fintech itu mungkin salah satu *option* untuk menjangkau di *unbanked population* tapi kami merasa perlu adanya *roadmap* yang menyeluruh antara perbankan dan fintech, dukungan untuk bank untuk digitalisasi layanan keuangan dan kerja sama dengan fintech dan juga simplifikasi perizinan kerja sama antara bank dan mitra bank.

Ada beberapa hal lagi rekomendasi kami dari Perbanas yang mungkin belum tercantum di sini. Satu adalah bagaimana pendalaman pasar itu bisa dapat kita lebih intensifikasikan. Salah satunya adalah kita mengetahui bahwa kita adalah menganut rezim devisa bebas dan kita mengetahui bahwa likuiditas di pasar sekarang mengalami pengetatan dan LDR 94-95%.

Kami berpendapat alangkah baiknya bila kita buka dari segi ...(suara tidak jelas) *management product*, di mana diberikan kesempatan untuk masyarakat untuk membeli *offshore product* di luar, karena sekarang ini banyak sekali masyarakat yang ingin membeli *offshore product* seperti ...(suara tidak jelas) atau dia baca-baca buku lihat wah Alibaba bagaimana, di Eropa bagaimana, dia ingin investasi, tapi dia tidak bisa karena ditutup kemungkinannya untuk *offshore product* di Indonesia. Jadi apa yang dia lakukan dia transfer uangnya ke Singapura, dia transfer uangnya ke Hongkong, dia transfer uangnya ke London untuk buka *fund-fund* tersebut.

Kalau kami merasa bahwa dengan dibukanya pendalaman pasar lebih lanjut secara global, dia tidak perlu buka rekening di Singapura, dia tidak perlu buka rekening di Hongkong dan sebagainya, tapi dia akan keluar masuk di dalam negeri dan pendalaman valuta asing dari segi investasi itu akan sangat mendorong likuiditas ke depannya. Jadi sebelum tahun 2007 memang cukup terbuka di kita, tapi sejak tahun 2008 sejak *global financial crisis* ditutup lagi, tapi kami merasa ini sudah waktunya untuk mendorong likuiditas dan pencegahan orang untuk secara masif buka *account*, di luar lebih bagus kita tawarkan produk-produk tersebut di dalam negeri.

Yang kedua, salah satu dari segi rekomendasi adalah bagaimana konsolidasi. Kami merasa konsolidasi di perbankan ini sangat baik. Dari segi pengawasan, dari segi efisiensi dan dari segi struktur ke depannya di perbankan nasional.

Jadi salah satu yang kami coba rekomendasikan adalah bagaimana kalau kita tinjau kembali undang-undang dari perbankan syariah, yang mana kami sebagai induk kami harus *spint-off* bank ke bank umum syariah di tahun 2023. Kami merasa

beberapa dari bank-bank yang UUS (Unit Usaha Syariah) itu *performance*-nya baik, *performance*-nya cukup stabil, efisiensinya bagus ...(suara tidak jelas) dari segi teknologi, proses dan sebagainya sangat baik, jadi kami merasa bahwa akan baik kalau bisa ditinjau kembali keperluan untuk *spint-off* sehingga untuk mengurangi *cost* efisiensi dan juga konsolidasi pasar tidak perlu lagi kita membuka-buka bank lagi yang baru-baru lagi, kita maunya konsolidasikan perbankan secara menyeluruh.

Mungkin itu saja dari Perbanas Pak, terima kasih dan selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih pada Perbanas Pak Tigor yang sudah memberikan paparannya.

Selanjutnya kami persilakan Asbisindo.

KETUA ASBISINDO (TONI E.B. SUBARI):

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mungkin diperkenalkan timnya dari Asbisindo Pak Toni.

KETUA ASBISINDO (TONI E.B. SUBARI):

Baik, terima kasih.

Saya Ketua Umum Toni Subari, kebetulan ada Ketua di samping saya Pak Firman dari Dirut BNI Syariah, juga hadir Pak Natari dari Dirut BRI Syariah, kemudian sekaligus hadir dari Pak Koko dari Victoria Syariah dan juga ada Pak Erwin dari Permata Syariah Pak. Ini semua pengurus dan juga ada Pak Fandi dari CIMB Niaga Syariah. Jadi cukup mewakili dari perbankan syariah secara menyeluruh.

Baik.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-bapak Anggota dari Komisi XI DPR RI.

Pada kesempatan ini kami memberikan gambaran sedikit Pak, selama ini banyak isu terkait dengan perbankan syariah yang mungkin belum dipahami secara menyeluruh peta kami di nasional Pak. Mungkin pertama kami sampaikan gambaran bahwa perbankan umum perbankan syariah ini total ada 14 BUS (Bank Umum Syariah) dan 20 unit usaha syariah dan ada 165 BPRS. Yang jadi tantangan ada di perbankan syariah ini komposisi di perbankan syariah hanya 1 bank umum syariah di Buku III, lainnya di Buku II dan Buku I dan di perbankan umum ada 97 perbankan konvensional dan 97 bank yang ada di nasional.

Next selanjutnya ini kami memberikan gambaran terhadap Bapak-bapak bahwa *market share* perbankan syariah yang selama ini menjadi isu, itu sebenarnya dalam 8 tahun terakhir ini tumbuh hampir 100% dari awalnya kita di 3,28 di posisi Oktober sudah di 6 ...(suara tidak jelas).

Next, nah yang juga untuk memberikan sedikit gambaran perbankan syariah pertumbuhan di beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di perbankan syariah itu kalau dibanding dengan perbankan secara umum itu pertumbuhan aset setiap tahun itu tumbuh berkisar 11,5 sampai 12% di sisi aset dan di dalam pembiayaan atau kredit itu pembiayaannya tumbuh 11 sampai di kisaran 12,5% dan dana pihak ketiga pertumbuhannya adalah sangat baik di kisaran 13% dibanding dari perbankan secara umum. Jadi boleh dikatakan market dari syariah itu sangat baik, pertumbuhannya sangat baik, yang jadi isu adalah perbankan syariah ini total asetnya total aset perbankan syariah kalau Bapak dan Ibu lihat di chart yang pertama itu total 496.000.000.000.000,- perbankan konvensional atau konvensional itu totalnya 7.905.000.000.000.000,- sehingga perbankan konvensional itu tumbuh 10% cukup 10% saja sudah 790.000.000.000.000,- itu sudah 100% lebih dari pada perbankan syariah. Itulah yang menjadi dasar seakan-akan perbankan syariah ini kena *trep* pertumbuhannya di kisaran 5%.

Jadi tantangan di perbankan syariah adalah total asetnya, jumlah perbankannya dan juga dari total selanjutnya nanti bisa kami berikan gambaran di jaringan dan segalanya. *Next* ini gambaran umumnya dan juga dari sisi *e-CAR*-nya, di *FDR*-nya atau *LDR* perbankan syariah sangat bagus. Perbankan syariah boleh dikatakan tadi kami sampaikan dan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah itu rata-rata 13%, jauh lebih tinggi dari pada perbankan nasional yang di kisaran 7 sampai 8%, sehingga *FDR* atau *LDR* ...(suara tidak jelas) perbankan syariah itu di kisaran tidak lebih dari 88%. Jadi masih ...(suara tidak jelas) besar di dalam *DPK*-nya. Dengan *ROA* dan kualitas semakin baik dan juga biaya operasi ...(suara tidak jelas) efisiensi juga sudah mendekati dari pada perbankan konvensional.

Selanjutnya ini juga untuk sedikit gambaran Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini menjadi tantangan di kita bahwa perbankan syariah itu komposisi di dalam pendanaannya karena keterbatasan jaringan yang di mana perbankan syariah boleh dikatakan sebagai ...(suara tidak jelas) industri yang baru berdiri 20 tahun yang paling tua di 27 tahun, itu perbankan syariah itu isun-nya dananya masih komposisi dananya masih didominasi oleh dana deposito, sehingga kalau gambaran di atas di dana deposito di perbankan syariah itu di kisaran 56% dan kalau di perbankan secara umum 44%, ini tantangan tersendiri sehingga walaupun konsepnya di perbankan syariah adalah konsep bagi hasil, namun di sisi di sini menjadi tantangan perbankan syariah yang *cost of fund*-nya menjadi cukup kalau dalam bahasa konvensional adalah biaya dana itu *cost of fund*, di kami di bagi hasil atau nisbah itu cukup menantang karena *cost of fund*-nya cukup mahal. Di sini menjadi tantangan kami di perbankan syariah.

Kemudian selanjutnya dan di sini mungkin Bapak dan Ibu juga bisa kita berikan gambaran sebagai gambaran perbankan syariah ini total *outlet*-nya satu tadi *size*-nya jumlah bank-nya dan ukuran bank-nya hanya ada satu perbankan syariah

di Buku III, selanjutnya di Buku II dan Buku I, kalau juga dari total *outlet* perbankan syariah ini hanya di Indonesia seluruhnya baru 2.273, dibanding dengan perbankan nasional 29.000 jaringan, ini salah satu tantangan juga di perbankan syariah sehingga komposisi di pembiayaan perbankan syariah pada umumnya masih didominasi oleh dana yang cukup dengan beban bagi hasil yang cukup besar, walaupun di tantangan terakhir perbankan syariah sudah melakukan perubahan-perubahan di era digital dengan semua *online* ...(suara tidak jelas) Dan segalanya, namun sekali lagi perbankan syariah adalah perusahaan bank yang masih di umur yang sangat muda di Indonesia.

Next selanjutnya, nah ini juga jadi tantangan juga untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu, karena sekali lagi saya tegaskan di perbankan ini selalu dikatakan perbankan syariah adalah potensi yang bagus namun di sisi masalah *market share*, ini tantangan juga di kami di perbankan syariah. Itu literasi dan inklusi perbankan syariah memang kami akui sangat rendah dibanding dengan perbankan konven. Ini isu yang utama adalah pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, apa beda perbankan syariah dengan perbankan konven ini menjadi sangat menantang untuk kami bisa menjelaskan dalam bahasa yang singkat, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Padahal pada prinsipnya perbedaan yang cukup mendasar dan ini mungkin konsep ekonomi yang ke depan sangat bagus, karena konsepnya adalah konsep bagi hasil yang didasarkan atas asas keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan. Ini yang mungkin konsep bisnis yang berkembang ke depan karena konsep yang sangat berbagi.

Next selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian dengan asumsi mohon maaf kami tidak tampilkan dengan asumsi-asumsi tadi secara ekonomi makro sama yang diberikan gambaran oleh Bapak Sunarto maupun Bapak Tigor, ini dengan asumsi di pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah ini yang kami masih cukup optimis tinggi di kisaran 11 sampai 13%, DPK juga cukup optimis tinggi karena market mulai bergerak terkait dengan pasar syariah di kisaran 12 sampai 13% dan di NPF atau NPL di kisaran 3 sampai 3,25% kami meyakini *market share* perbankan syariah ke depan akan semakin besar yang saat ini kita prognosakan di akhir tahun akan 6%, *inshaAllah* di tahun 2020 dan 2021 di 6,63%. Namun di sini ada suatu asumsi dengan kebijakan adanya kebijakan qanun Aceh yang harus kami selesaikan di awal tahun 2022, di mana total perbankan konven di Aceh itu sekitaran 30.000.000.000.000,- dan ada beberapa perbankan daerah yang akan segera mengkonversi diri hijrah kepada syariah, ini dengan asumsi juga kita menginginkan kepada pemerintah adanya suatu bank Buku IV yang sudah kami sampaikan juga kepada beberapa *stakeholders* untuk mengangkat perbankan syariah *InshaAllah* dalam tahun 2021 apabila ini semua berjalan pasti butir 1 dan butir 2 akan bisa kita realisir, namun butir 3 menjadi domainnya dari pada pemegang saham. *InshaAllah* perbankan syariah akan bisa *market share* di kisaran 9,4%.

Ini Bapak dan Ibu Anggota Dewan dari Komisi XI yang dapat kami sampaikan secara besarnya terkait dengan pajak dan segalanya akan kami sampaikan menyusul. Demikian yang bisa kami sampaikan.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada ASBISINDO Pak Toni Subari yang telah memberikan pemaparannya.

Selanjutnya kami persilakan dari Perbina, Pak Batara.

CHAIRMAN PERBINA (BATARA SIANTURI):

Terima kasih atas waktunya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Komisi XI.

Kami akan memberikan pemaparan mengenai kontribusi dari pada bank-bank internasional di Indonesia yang tergabung dalam Perbina, yang sudah kami juga ada di presentasi kami kepada Komisi XI.

Untuk memperkenalkan Perbina, bahwa kami mempunyai keanggotaan 22 bank, 4 bank dari Amerika Serikat, 5 bank dari Eropa, 2 bank dari Australia dan 11 bank dari Asia yang menunjukkan betapa pentingnya membawakan investasi dari pada bank-bank tersebut, baik dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, karena kebanyakan dari pada klien-klien dari pada bank-bank tersebut, bank-bank dari *member* kami, mereka akan juga mempunyai keinginan atau *interest* untuk investasi baik dalam *frontera investment*, *trade flow*, maupun *portfolio flow* baik di *equity capital market* maupun di *bond market*, karena itu dalam pemaparan kami, kami melihat bahwa ...(suara tidak jelas) dari pada untuk 5 tahun terakhir dari pada keanggotaan dari bank-bank internasional di Indonesia adalah untuk memberikan *inbound* dan *outbound support* untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk *inbound* dari pada investasi ke Indonesia yang dalam bentuk dua yaitu *trade investment* dan juga untuk *portfolio investment* yang bisa dilakukan melalui pendudukan FDI kepada Indonesia melalui klien-klien kami yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sehingga dengan adanya representasi dan juga *membership* dari pada Perbina dari Amerika, Eropa, Asia dan Australia itu memfasilitasi bagi klien-klien kami di benua-benua tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Memang banyak beberapa hal yang selalu kami berikan masukan dalam *roadshow* kami kepada ke negara-negara tersebut, maupun dari *reverse road show* dari pada klien-klien kami yang mendatangi Indonesia untuk melihat iklim investasi di Indonesia. Salah satu yang terus akan kami berikan masukan bagaimana Indonesia apa lagi tadi oleh rekan saya di Perbanas dalam iklim *tradeshows* dan *supply chain movement* dari pada China kepada Asian, di mana supaya Indonesia mendapatkan ...(suara tidak jelas) dari pada FDI dibandingkan dari pada rekan-rekan di Asian yang lainnya dan untuk saat ini memang kita melihat bahwa sangat penting untuk memberikan satu *improvement* kepada *is of doing bussiness* dari pada World Bank dari pada Indonesia dibandingkan dengan negara Asian yang lain.

Indonesia saat ini ranking 73 masih di bawah Vietnam 70, masih di bawah Thailand 21, masih di bawah Malaysia ranking 12, masih di bawah Singapura ranking 2. *So is of doing bussiness* adalah hal yang kami dapatkan dari pada global

industries baik dari pada FDI maupun dalam *portfolio investment* bagaimana ini terus bisa menjadi lebih kompetitif dari pada Indonesia dibandingkan dengan Asian ...(suara tidak jelas) dari pada Indonesia untuk mendapatkan portion dari pada *supply chain movement* dari pada Asia dalam *trade war* konteks.

Yang kedua memang kami juga men-*support* fasilitasi dari pada *portfolio movement* dari pada *global industries*, baik di *bond market* maupun *equity market* bank-bank internasional di Indonesia adalah *big players in custody bussiness* yang memfasilitas *portfolio flow* untuk masuk dan keluar dari pada Indonesia dan jelas di sini bahwa untuk *attractiveness* dari pada *bond market* dan juga *equity market* kita lihat banyak sekali fasilitasi sudah dilakukan oleh bank Indonesia, bagaimana supaya iklim dari pada investasi dalam *portfolio* ini lebih kondusif lagi untuk tahun 2020.

Dan yang terakhir untuk FDI adalah *outbound FDI*, kita melihat 2 tahun terakhir bahwa banyak Indonesian Champion nama-nama korporasi dari pada Indonesia ingin untuk ekspansi ke luar Indonesia, baik ekspansi ke Singapura, ekspansi ke Thailand, ekspansi ke Vietnam, dan di situlah *role* dari pada *internasional bank* memfasilitasi *expansion* mereka di Asian Countries ataupun juga di negara-negara Asia lainnya.

Untuk *role* dan *contribution* yang lain, kami bisa membawakan bahwa bank-bank internasional akan terus membawakan *inovation* kepada *capital market*, kami membawakan *inovation* dalam *green bond* untuk Republic of Indonesia yang pertama di dunia. Kemudian juga untuk ...(suara tidak jelas) yang meng-*upgrade* Republic of Indonesia dalam *global capital market* di *bond*, dan juga kita membawakan *sustainable global bond*, *global bond* yang sudah dilakukan dengan juga Bank BRI pada tahun 2019 ini.

Kemudian untuk beberapa hal yang bisa memberikan masukan salah satu dari pada kontribusinya adalah untuk *talent*. Kita melihat bahwa *inline* dengan prioritas dari pada *human capital*, investasi dari pada bank-bank internasional akan terus terfokus kepada *human capital* dan bagaimana membawa *human capital* yang berskala global kembali kepada Indonesia.

Pada saat ini ada sekitar 400 bankir Indonesia yang bekerja di *global network* dari pada *members* dari pada Perbina dan pada saatnya bank-bank berkompeten tersebut yang mempunyai pengalaman di Asia, mempunyai pengalaman di Eropa, mempunyai pengalaman di Amerika akan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi untuk *human capital* dari pada perbankan sektor Indonesia.

Jadi saya rasa itu saja yang bisa kami paparkan untuk *introduction* dari pada Perbina, untuk masukannya Pak bahwa kami juga ingin beberapa seperti tadi rekan saya dari pada dari Perbanas bahwa dalam beberapa hal *regulation* kami ingin juga bahwa beberapa *regulation* ini akan mendukung *digital economy* dari pada Indonesia, seperti yang dilakukan dan juga dipublikasikan dari *Google Temasek* bahwa *digital economy* Indonesia tahun ini adalah Empat Puluh Billion yang akan naik menjadi Seratus Tiga Puluh Tiga Billion di tahun 2025, sehingga kami mengharapkan kalau untuk men-*support* *digital economy* Indonesia tadi Empat Puluh Bilion menjadi Seratus Tiga Puluh Tiga Billion, regulasi digital harus ditulis

dalam konteks digital dan bukan analog, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali *forward looking regulation* yang akan kita juga berikan masukan supaya lebih digital lagi, sehingga proyeksi dari pada *Google, Temasek* dan *Bain* bahwa Indonesia akan naik dari Empat Puluh Billion menjadi Seratus Tiga Puluh Tiga Billion di tahun 2025 akan bisa terealisasi juga.

Dan yang kedua juga keinginan kami dalam digitalisasi adalah bagaimana bisa meng-*upgrade* sehingga sinergi antara Fintech dengan perbankan ini bisa dengan baik yaitu bagaimana mendigitalisasi kredit biro, sehingga kita mendapatkan *end to end* dan juga *realtime analysis* mengenai kredit biro supaya konteks dari pada kredit baik di Fintech maupun di perbankan terintegrasi melalui digitalisasi dari pada kredit biro.

Saya juga men-*support* tadi masukan dari pada rekan saya di Perbanas mengenai *offshore banking*. Dengan masuknya Indonesia di *automatic exchange of information*, saya rasa sudah waktunya kita melihat bagaimana perbankan Indonesia akan lebih kompetitif lagi dibandingkan dari pada *financial sector* di Singapura dan Hongkong, sehingga kita bisa melihat dalam konteks *automatic exchange of information* ini bagaimana kita bisa membuat regulasi-regulasi lagi yang bisa membuat sektor perbankan Indonesia lebih kompetitif, *as competitive as Singapura* dan juga Hongkong.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Perbina, Pak Batara Sianturi yang telah memberikan pemaparannya.

Selanjutnya saya persilakan kepada Asbanda.

DIRUT EKSEKUTIF ASBANDA (WIMRAN ISMAUN):

Terima kasih Pak.

Yang kami hormati Pak Ketua Komisi XI DPR RI, Bapak H. Dito Ganinduto, M.B.A., beserta Bapak-bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,

Seluruh Ketua Umum Asosiasi, Ketua Umum Himbara, Ketua Umum Perbanas, Ketua Umum Perbalindo, Ketua Umum Asbisindo, dan Ketua Umum Perbina serta jajarannya,

Rekan-rekan media serta Hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah yaitu mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi dari pada BPD ada 3 sebagai pendorong sejatinya tingkat pertumbuhan perekonomian di daerah. Yang kedua, pemegang kas

daerah atau sebagai pengelola keuangan daerah. Dan yang ketiga adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Kami akan menyampaikan sedikit kondisi BPD saat ini. Jumlah BPD yang tergabung dalam asosiasi ada 27 bank, dengan kepemilikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota dan investor strategis. Saat ini ada 2 BPD yang sudah IPO yaitu Bank BJB dan Bank Jawa Timur. Adapun total aset posisi September 2019 adalah sebesar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Triliun lebih dengan aset terbesar adalah dimiliki oleh Bank BJB yaitu sebesar Seratus Tujuh Belas koma tiga Puluh Empat Triliun dan aset terkecil dimiliki oleh Bank Sulawesi Tengah yaitu sebesar Enam koma Sembilan Lima Triliun, memang kelihatannya jomplang sekali Pak.

Adapun kisaran modal inti posisi bulan Juni 2019 terbesar adalah Bank BJB yaitu sebesar Delapan koma Sembilan Triliun, sedangkan bank dengan modal terkecil adalah Bank Banten yaitu sebesar Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Rupiah.

Adapun jaringan kantor BPD tersebar di seluruh wilayah nusantara, bahkan sampai ke perbatasan dengan negara lain. Total aset sampai dengan posisi September 2019 sebesar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Triliun lebih dan *year on year* tumbuh 12,52%. Sedangkan untuk dana pihak ketiga posisi September 2019 adalah sebesar Lima Ratus Tujuh Puluh Triliun lebih dan tumbuh *year on year* sebesar 12,97%.

Adapun total kredit saldo BPD sampai dengan posisi September 2019 sebesar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan koma Dua Puluh Satu Triliun atau tumbuh sebesar 10,71% dari tahun sebelumnya. Sementara laba yang diraih oleh BPD posisi September 2019 sebesar Delapan koma Tiga Puluh Delapan Triliun atau tumbuh sebesar 7,75%.

Adapun modal inti BPS sampai dengan Juni 2019 sebesar Tujuh Puluh dua koma Tiga Puluh Triliun dan BPD sebagai menjadi tiga kategori buku yaitu empat BPD Mas sudah Buku III, delapan BPD dalam Buku II, dan masih ada lima BPD yang masih kategori Buku I.

Bapak Pimpinan, Hadirin yang kami hormati,

Pada tanggal 26 Mei 2015 program transformasi BPD telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana Negara, di mana berkomitmen untuk memperkuat BPD menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi, kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan di daerah.

Dalam *roadmap*-nya program transformasi BPD ini diharapkan dapat terwujud pada akhir 2024 yang akan datang. Sudah banyak pencapaian yang sudah diraih dalam program transformasi BPD ini dan pada kesempatan singkat ini kami sampaikan bahwa program transformasi yang sudah dicapai diantaranya yaitu ditetapkannya logo bersama BPDSI sebagai simbol bahwa kita adalah sama, yang meskipun dimiliki oleh masing-masing Pemda, namun ke depan semua produk dan layanan kami akan sama. Kami juga sudah menyusun buku pedoman yang standar untuk dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia.

Pendirian bank-bank daerah adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok-pokok Bank Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 4 Undang Undang Dasar tersebut disampaikan bahwa bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Sedangkan maksud khusus atas pendirian BPD tercantum dalam Pasal 5 yaitu memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran atau pemerintah daerah dan swasta.

Selanjutnya dalam Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 negara mengakui keberadaan Bank Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 3 Undang-undang Perbankan Tahun 1967 menyebutkan bahwa ada 4 jenis bank menurut fungsinya yaitu Bank Central, Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan. Sedangkan khusus tentang BPD secara eksplisit disebut di dalam Pasal 16.

Bapak Pimpinan Sidang, Hadirin yang berbahagia,

Undang-undang khusus mengenai BUMD yang seharusnya menjadi acuan bagi kami sebagai BUMD sampai saat ini belum ada. Namun ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai BUMD ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertuang pada Bab XII yaitu tentang BUMD, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 343. Jadi ada 13 pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah ini yang mengatur tentang BUMD. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 339 ayat (1) *“Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah”*. Pasal 339 ayat (2) *“BUMD yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”*.

Pada tanggal 27 Desember 2017 sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan pemerintah ini lebih merinci ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, namun peraturan pemerintah ini pun juga mungkin masih dirasa kurang dan perlu diperjelas atau diatur lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga akan tercipta harmonisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

BUMD yang ada saat ini sangat beraneka ragam, baik dari jenis usahanya maupun dari skala usahanya. BPDSI sebagai BUMD pada September 2019 mii total aset Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Triliun lebih dan Bank BJB sebagai bank paling besar diantara BPD pada Desember 2017 memiliki aset sebesar Seratus Tujuh Belas Triliun, sedangkan BPD yang paling kecil posisi asetnya sebesar Enam koma

Sembilan Triliun. Sebagai BUMD yang memiliki aset terbesar, BPD juga sangat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri bahwa kontribusi laba BPD sebesar 92,73% dari total laba BUMD, maka sangatlah pantas kalau BPD menjadi salah satu tulang punggung Pemda dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Saat ini tinggal empat BPD yang ada Pemda memiliki saham di atas 51%, selebihnya masing-masing Pemda memiliki saham di bawah 51%. Kondisi seperti ini yang perlu dicari penyelesaiannya, jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi BPD.

BPD yang merupakan industri perbankan merupakan salah satu industri yang syarat dengan ketentuan, karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana serta kepercayaan dari masyarakat yang menempatkan dananya di bank. Banyak sekali aturan yang harus diikuti dan dipatuhi, baik aturan dari regulator maupun dari *stakeholder* lainnya. Apabila BPD dimiliki oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, maka regulasinya pun cukup banyak, termasuk peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Khusus terkait dengan operasional perbankan, tentu BPD harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia dan OJK.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan permodalan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa permodalan BPD sampai saat ini ada 4 BPD yang sudah di Buku III tapi masih banyak yang masih di bawah itu. Ada 18 BPD yang di Buku II dan masih ada 5 yang di Buku I.

Bagaimana memperkuat permodalan BPD, yang pertama dilakukan penambahan setoran modal melalui setoran pemegang saham, tapi ini kenyataannya sulit dilakukan. Yang kedua, yaitu melalui IPO baru 2 BPD yang IPO yaitu Bank BJB dan Bank Jawa Timur, dan yang ketiga dilakukan oleh melalui kerja sama dengan investor strategis. Saat ini ada dua BPD yang kerja sama dengan investor strategis yaitu Bank Sulut Go dan Bank Sulteng.

Terkait dengan setoran pemegang saham berdasarkan hasil pengawasan OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan moda BPD relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan lainnya, baik pertumbuhan modal secara organik yang berasal dari pemupukan laba maupun beretambah setoran modal yang berasal dari pemegang saham.

Besarnya dividen yang dibayarkan BPD kepada pemegang saham pada kisaran 60 sampai 70% setiap tahunnya. Jumlah ini relatif jauh di atas rata-rata industri yang hanya pada kisaran 20 sampai 30%. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan BPD dalam pemupukan modal secara organik.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan BPD syariah, saat ini sedang dilakukan kajian tentang pembentukan Bank Umum Syariah BPD se-Indonesia yang merupakan gabungan dari UUS BPD. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tahun 2023 Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah. Bila masing-masing UUS BPD melakukan *spin off*, ini cukup berat dan sepertinya tidak memungkinkan. Kajian yang dilakukan bekerja sama dengan konsultan OJK melalui Departemen Perkembangan Syariah menyambut dan mendukung secara penuh rencana unifikasi UUS BPDSI.

OJK menyampaikan kepada ASBANDA agar mensinkronisasikan rencana unifikasi dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 PBI 2009 tentang Spin Off, Peraturan OJK Nomor 6/POJK03/2016 tentang Pemilikan Usaha Jaringan dan Modal Inti Bank dan Peraturan OJK Nomor 56/POJK03/2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Terakhir Bapak Pimpinan, di Jerman ada bank mirip BPD yang namanya sparkassen, Asosiasi Bank Sparkassen didirikan berdasarkan undang-undang, sehingga posisinya lebih kuat dan memiliki kewenangan. Mungkin salah satu yang dapat memperkuat BPD adalah dengan dibuatnya payung hukum yang dijadikan sebagai acuan kami BPD se-Indonesia.

Sejak 2010 bulan Juli Sparkassen ...(suara tidak jelas) telah bekerja sama dengan ASBANDA dan beberapa BPD terpilih menjadi terpilih dalam rangka turut menyukseskan BPD ...(suara tidak jelas) dan kini menjadi program ...(suara tidak jelas) DPD. Ada pun kerja sama dengan swasta lain adalah bentuk keuangan mikro yaitu penyaluran kredit usaha mikro yang berdasarkan pada arus kas dan bukan koleteral. Yang kedua edukasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Kerja sama ini akan berakhir 2019 ini. Realisasi kredit mikro yang sudah dilakukan saat ini sudah disalurkan kredit usaha mikro sebesar Dua koma Dua Triliun, disalurkan kepada lebih kurang 73.000 debitur. NPL di bawah 3%, dan sudah tercapai saat ini 270 Petugas Kredit yang terlatih.

Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kami akhiri.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Himbara, Perbanas, Asbisindo, Perbina dan Asbanda yang telah memberikan penjelasan dan pemaparannya.

Selanjutnya di sini sudah ada 11 penanya, 12 malah, sebelumnya kita jadwalkan mungkin sampai jam 13.15 WIB ya setuju? Kalau tidak selesai kita *break* kita lanjutkan, kalau selesai sampai 13.15 WIB setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Mulai dari sebelah kiri Pak Muhidin, ya, kemudian siap-siap Pak Andreas.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(SEBAGIAN REKAMAN RUSAK/TIDAK BISA DITRANSKRIP)

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Bahwa kredit konstruksinya sudah ...(suara tidak jelas) dan kita ketika ketemu dengan Bank Indonesia memang *roadmap*-nya Bank Indonesia itu kredit untuk konstruksi ini akan dialihkan ke UMKM, angkanya di sekitar 20%. Bagaimana kesiapan yang selama ini terutama yang Himbara ini yang karena kalau dilihat LDR-nya memang uangnya sudah habis kan terbuang terpakai semua. Kalau mau konstruksi yang jor-joran memang uangnya sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana persiapannya untuk UMKM, kan beda kalau konstruksi ini nasabahnya kecil tapi pembiayaannya besar, tetapi kalau UMKM ini pembiayaannya kecil-kecil dan nasabahnya sangat banyak, ini perlu persiapan yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan seperti keinginan Bank Indonesia dari konstruksi ke UMKM. Kemudian seperti apa *performance* pinjaman di konstruksi ini? Apa memang karena sudah keterbatasan dana atau tampilan kredit konstruksi ini tidak menarik lagi dari segi keuntungannya?

Pertanyaan kedua terkait PTKP, tadi menguatkan apa yang disampaikan Pak Misbakhun di angka berapa? Karena kita memang sekarang kesulitan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, karena sudah habis subsidi dicabut, harga-harga dinaikkan, tarif listrik dinaikkan, sehingga itu menggerus daya beli dari masyarakat. Kira-kira di angka berapa tadi PTKP naiknya di angka berapa yang ada di benak Bapak? Dan kalau memang ini sepakat kita sama-sama mendorong agar PTKP ini segera dinaikkan lalu akan mendorong pertumbuhan dan nanti mungkin kawan-kawan di Bank Indonesia OJK bisa menghitung dengan kenaikan tingkat berapa, lalu pertumbuhannya yang bisa tercapai sampai berapa persen. Kami ingin pandangan dari HIMBARA dan PERBANAS.

Kemudian ke ASBISINDO, indikator yang disampaikan ke kita itu indikator keuangan, *Alhamdulillah* sudah baik, tapi kami tidak mendapatkan indikator terkait kesyariahnya gitu, karena orang melihat ini apa beda konvensional dengan syariah itu, kalau hanya yang ditampilkan hanya kinerja keuangannya saja, sehingga di masyarakat itu *image*-nya adalah bank syariah sama bank konvensional sama saja. Jadi apa yang bisa ditampilkan bahwa bank syariahnya itu dari segi kesyariahnya itu memang betul-betul terjadi dan tentu ini akan menjadi perhatian buat masyarakat.

Pertanyaan kedua untuk ASBISINDO ini terkait rendahnya literasi dan inklusi. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan ini, ini harus dilakukan secara masif, ini terkait dengan apa yang disampaikan disarankan dari PERBINA tadi untuk

digitalisasi perbankan. Mungkin di Hongkong, Singapura tidak ada masalah, kenapa, literasi dan inklusinya sudah *oke*. Kalau di kita dalam kondisi sekarang dilakukan digitalisasi itu nanti ekonomi kita akan dikuasai oleh segelintir orang saja. Makin jauh kesenjangan itu, karena pemahaman masyarakat terkait keuangan di Indonesia ini masih belum pada tingkatan yang diharapkan.

Jadi apa langkah-langkah masif? Karena digitalisasi ini satu keniscayaan, mungkin kalau pandangan yang memihak masyarakat bisa saja kita bilang tidak usah dulu dilakukan digitalisasi, tapi kan dunia terus berkembang, itu tidak bisa, yang bisa adalah bagaimana melakukan program literasi dan inklusi ini secara masif, yang di situ kami lihat di OJK juga masih lemah. Harus ada sinergi, apa lagi sekarang langsung dikepalai oleh Presiden dan Wakil Presiden, maka harus jelas programnya kepada kita agar perkembangan perbankan syariah ini bisa lebih baik.

Kemudian di bank syariah ini belum ada yang Buku IV. Apa pemikiran yang berkembang di ASBISINDO supaya bisa lahir bank syariah yang masuk level Buku IV, sehingga dia bisa menarik sebagai lokomotif bank-bank yang Buku II dan III.

Ke PERBINA, melanjutkan menguatkan ya, ini biasa saja orang bisnis ada bank asing datang kemari tentu ada yang dia ambil. Makanya kita perlu angka-angka itu supaya kita bisa melihat juga apa yang sebenarnya kita dapat di Indonesia. Jadi Bapak silakan untuk beraktivitas di Indonesia, tapi jangan hubungannya dengan Indonesia tempat beraktivitasnya bank-bank asing ini tidak seimbang. Sekarang siapa yang mengambil keuntungan yang lebih banyak. Kita mau melihat keadaan itu, sehingga kalau memang posisi Indonesia dalam posisi yang lemah kita akan lihat bagaimana melakukan upaya-upaya untuk menyeimbangkannya, sehingga hubungan kita adalah hubungan yang saling menguntungkan.

Terakhir terkait ASBANDA. Saya kira undang-undangnya ini perlu dikaji ulang terkait ASBANDA, apa lagi salah satu tujuan untuk membangun ekonomi daerah. Yang sekarang membangun ekonomi daerah harus diakui justru itu yang benar membangun ekonomi daerah itu adalah BRI Pak, karena dia sudah sampai kepada tingkat yang paling rendah, langsung masuk ke masyarakat. Sementara ASBANDA ini kan masih di ibu kota, paling satu-satu ada di kecamatan. Jadi dari segi untuk membangun daerah justru lebih besar porsinya dilakukan oleh BRI. Jadi ini perlu kita kaji ulang undang-undangnya, di mana salahnya ini? Di satu sisi dia mau bangun ekonomi daerah, tapi ternyata sudah diambil alih. Kalau dari sisi ini, kalau dari sisi ini ya buat apa ada bank daerah, kita bersyukur saja daerah ini sudah ada BRI yang mengambil kerja-kerja bank daerah. Dananya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain.

Kemudian masalah penyumbang PAD juga ini perlu dipertanyakan juga, karena tidak digambarkan perbandingannya dengan modal. Pengalaman kami di daerah memang setiap tahun ada masuk PAD dari dividen, tapi pada saat yang bersamaan juga ada penyertaan modal lagi, jadi masuk ke PAD, nanti keluar lagi penyertaan saham. Jadi sesungguhnya PAD-nya besar sumbangannya tapi pada hakikatnya tidak bisa dimanfaatkan karena kembali lagi untuk menjaga pertumbuhan bank daerah itu dan pertumbuhan lambat itu bank daerah. Kenapa bisa lambat

pertumbuhan bank daerah ini? Karena apa tidak siap bersaing, nanti silakan dijelaskan karena setahu saya struktur terbesar dari kreditnya bank daerah itu kan kepada pegawai, bahkan kepada proyek-proyek yang dimiliki oleh daerah itu pun bisa diambil oleh bank yang lain. Jadi bank daerah ini memang harus kerja keras dan kalau mau kuat seperti disampaikan Pak Harry Poernomo tadi, ya gabung saja biar daya saingnya menjadi lebih besar ketimbang mempertahankan ego dan ini pernah saya pertanyakan kepada beberapa Pimpinan Daerah memang kehadiran bank ini hanya untuk gengsi saja, karena tadi itu membangun daerah sudah BRI. Kalau untuk yang pegawai, itu bisa ditangani oleh bank-bank yang sudah ada.

Jadi pemikiran kita untuk mengkaji ulang Undang-undang tentang Bank Daerah ini kalau memang efektif untuk membangun daerah ya silakan saja, tapi kalau memang hanya begini-begini saja kita perlu kaji ulang untuk eksistensi bank daerah ini untuk agar dia bekerja lebih keras lagi, berkompetisi secara sehat dengan bank-bank lain yang sudah ada di daerahnya masing-masing.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih yang terhormat Pak Hidayatullah.
Selanjutnya yang terhormat De Puteri Komaruddin.

F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDDIN, B.Com.):

Terima kasih Kaka Dito Ganinduto.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Izin Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Selamat siang Pak Ketua HIMBARA, ASBISINDO, PERBANAS, PERBINA, dan ASBANDA beserta jajaran,

Perkenalkan nama saya Puteri Komaruddin dari Fraksi Partai Golkar. Daerah pemilihan Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Pertanyaan saya sebenarnya bisa dijawab oleh semua asosiasi itu terkait dengan pemodal-pemodal dan bank asing yang masuk ke perbankan kita melalui akuisisi oleh bank lokal, karena di beberapa media juga Pak Kartiko sebagai Ketua Perbanas pada waktu itu, sekarang masih ya Pak Kartiko? Iya sudah jadi Wamen, sebelum jadi Wamen beliau menyatakan bahwa akuisisi ini sejatinya kan untuk memenuhi standar akuntansi yang baru yang PSAK 71 itu, sehingga ada perbedaan

perhitungan CKPN. Jadi Indonesia memerlukan dukungan dari pemodal luar negeri dan beliau juga menyatakan bahwa terdapat anggapan perbankan domestik kita itu harus fokus di bidang mikro, usaha kecil untuk kredit UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah), karena untuk bersaing dengan bank-bank asing dalam hal penyaluran kredit korporasi di perkotaan itu tentu saja sulit gitu. Nah sementara tadi menurut paparan dari Bapak-bapak sekalian itu, kita semua tahu bahwa bank yang paling efektif menyalurkan kredit mikro itu hanya BRI dan Mandiri, BNI dan sebagainya masih bukan tertinggal namun masih di belakangnyalah gitu.

Jadi pertanyaan saya adalah apabila persaingan dari bank-bank asing ini dengan perbankan domestik kita akan terjadi ke depannya, bagaimana caranya menyalurkan kredit mikro dengan strategi yang tepat, karena seperti yang kita tahu juga progres inklusi keuangan yang dijalankan oleh OJK sampai sekarang itu memang belum maksimal, karena Indonesia negara yang luas, banyak sekali provinsi dan pulau-pulau kecil yang susah dijangkau, bahkan oleh perbankan yang *mainstream*, sehingga fenomena rentenir itu masih banyak terjadi diantara masyarakat kita. Saya yakin Bapak-bapak yang punya cabang di kota-kota kecil, termasuk di daerah pemilihan saya itu sering mendengar dari masyarakat terkait rentenir-rentenir yang meminjamkan dana dengan bunga 30% per bulan. Sementara perbankan kita terus bersaing dengan rentenir seperti itu karena persyaratan mereka mudah, tidak usah ada agunan dan sebagainya. Sementara kalau di perbankan tentu harus ada manajemen resiko, makanya harus ada agunan gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengefektifkan kembali strategi mikro ini gitu agar perbankan itu tidak usah kalah lagi dengan rentenir-rentenir di kabupaten kota yang masih sulit dijangkau gitu. Itu yang pertama.

Dan selanjutnya pemerintah juga masih kesulitan untuk genjot kredit usaha di sektor produksi. Lalu Pak Darmin waktu itu ketika beliau masih menjabat sebagai Menko Perekonomian pernah menyatakan bahwa akan lebih efektif kalau UMKM di sektor produksi ini dijadikan klaster, sehingga bank-bank akan lebih mudah untuk menyalurkan kreditnya. Yang jadi masalah adalah ketika UMKM ini dijadikan klaster dan sudah dicoba oleh beberapa bank juga, dijadikan kelompok UMKM di mana nanti sistem pembayarannya tanggung renteng, jadi sehingga ketika ada nasabah yang tidak bisa membayar, temannya di kelompok tersebut yang menambal utangnya gitu.

Di daerah-daerah banyak sekali yang apa hal tersebut itu menciptakan konflik, konflik sosial diantara para peminjam tersebut, di mana mereka akhirnya saling menyalahkan, ada yang akhirnya usahanya jadi rugi, padahal sebelumnya untung karena dia harus menambal temannya dan sebagainya dan saya tahu di OJK itu belum ada ketentuan terkait dengan model kredit seperti ini, model pinjaman kelompok seperti ini. Jadi apabila nanti akan ada pengaturan yang akan mengatur tentang kredit kelompok seperti ini, sebenarnya apa yang menjadi kendala terbesarnya, karena kita tahu ketika sudah mencakup sektor mikro, SDM yang dibutuhkan lebih banyak dan mereka juga harus lebih bisa membaca kearifan lokal dari tempat mereka berada gitu, beda dengan kredit korporasi di mana satu orang RM itu bisa megang 10 sampai 20 perusahaan itu, tentu tantangan yang dihadapi

oleh pegawai-pegawai bank yang ada di daerah itu untuk kredit UMKM lebih besar gitu. Jadi sebenarnya apakah solusinya untuk kredit mikro ini gitu?

Dan yang lain lagi adalah tentang KUR TKI, karena pemerintah rencananya akan mengajak bank asing untuk bekerja sama untuk penyaluran kredit TKI ini yang selama ini bermasalah karena kita tahu bank-bank BUMN kita mempunyai cabang yang sedikit sekali di luar negeri gitu. Jadi bagaimana kesiapan PERBINA sendiri untuk penyaluran ini? Apakah sudah ada *roadmap* dan strateginya? Dan bagaimana menghadapi tingginya NPL kredit TKI ini? Karena yang kita tahu KUR TKI itu menjadi salah satu *challenge* untuk HIMBARA juga karena NPL-nya cukup tinggi gitu. Apakah akan ada *cooperation* dengan *parent company* atau bagaimana gitu baiknya?

Sekian dari saya, terima kasih banyak.

Wabillaahittaufik walhidayah,

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Pak Ramson Siagian dan dilanjutkan setelah itu yang terhormat Pak Sarmuji.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Shaloom,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Pak Ketua dan Rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Bapak-bapak Pimpinan dan jajaran dari HIMBARA, PERBANAS, PERBINA,
ASBISINDO DAN ASKRINDO ya dan semua yang saya hormati.**

Tadi rekan-rekan Anggota yang terhormat sudah banyak menyampaikan argumentasi-argumentasi yang konstruktif. Saya memperkenalkan nama saya Ramson Siagian. Kalau di Dapil namanya dipanggil Bung Ramson, Dapil Jawa Tengah X Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang. Saya di DPR RI sudah sejak 1999, tapi Komisi XI kembali lagi ke sini 10 tahun yang silam saya meninggalkan Komisi XI.

Tadi banyak yang menarik tapi saya pilah saja bahwa antara lain HIMBARA datanya kurang lengkap. Kalau saya lihat PERBANAS agak lumayan bisa

menjelaskan *loan to deposit ratio*, ...(rekaman suara kurang jelas) *ratio*, *non-performing loan* sama *nett interest margin* dijelaskan di sini.

Terus yang juga PERBINA, PERBINA juga ada yang menarik bahwa untuk surat utang negara yang dilakukan oleh pembeliannya melalui, artinya PERBINA yang memberikan kredit ini sindikasi atau dilempar lagi ke *market* nilainya saya melihat dalam waktu 1 tahun sekitar Dua Belas Miliar US Dollar sama Satu Setengah Miliar Euro, nah ini bersaing dengan pemberian kredit ke ektor ril, karena harus membeli surat utang negara yang bunganya cukup tinggi. Nah ini memang *problem* antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di satu sisi Bank Indonesia telah menurunkan acuan suku bunga, tetapi di bank-bank pelaksana saya melihat belum turun, seperti misalnya Bank Mandiri ada di sini, sektor ril bunga untuk konsumsi saja masih 20% rilnya, padahal suku bunga sudah turun dari Bank Indonesia, padahal itu kan dari sisi *demand* kita memerlukan penurunan suku bunga konsumtif untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, variabel dari pertumbuhan ekonomi, dari sisi *supply* juga menurunkan suku bunga juga penting agar industri-industri kelas menengah *manufacturing* maksud saya bisa memperoleh bunga yang rendah dan mereka mampu bersaing, karena kehebatan China 25 tahun pertumbuhan ekonomi *double digit*, karena mereka bisa mendorong industri *manufacturing* yang punya keunggulan komperatif. Jadi mereka *mapping* dan bersaing di situ.

Waktu itu sekian puluh tahun bahwa produk-produk hasil industri *manufacturing* dari China yang banyak menguasai pasar di Amerika dan Eropa, sekarang memang sudah masuk dari Thailand dari Bangladesh dan sebagainya, tapi Indonesia belum. Ini salah satu karena di sini juga rekan-rekan dari perbankan selalu mensitir soal masalah-masalah perlambatan ekonomi dunia seperti ini dari HIMBARA menyampaikan di sini perekonomian dunia konservatif, terus perang dagang apa semuanya, sebenarnya kita tidak perlu terlalu mereferensi terhadap bagaimana perang dagang dengan Amerika-China, tapi kita di pasar domestik aja kita sudah kalah bersaing, sudah barang-barang import, tapi bagaimana sektor perbankan ataupun bank-bank pelaksana mendorong sektor ril supaya mereka bisa kompetitif, tetapi kalau suku bunganya saja sudah sangat tinggi, bagaimana dari sisi *demand* misalnya kalau gajinya agak pas-pasan, kalau dia tidak dikasih kredit, dia kan tidak belanja. Jadi itu kan secara agregat juga akan meningkatkan *demand* kalau dikasih bunga kredit yang kompetitif.

Dari sisi *supply* juga kalau nanti industri-industri menengah itu *cost* mereka, *cost of money*-nya tinggi, mereka bagaimana mau kompetitif, harga-harganya di pasar domestik, apa lagi pasar regional, kita tidak usah bicara pasar global dulu. Nah ini kan mempengaruhi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita kalau ada disebut faktor konsumsi rumah tangga yang tinggi itu kan karena banyak BLT saja Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah dari sisi kebijakan fiskal, tapi akhirnya apa, melebar itu defisit, utang kita melebar, akhirnya apa, bersaing seperti yang saya baca di data PERBINA ini, yang saya cek langsung di sini Pak tadi. Berapa ini dari PERBINA yang mengkoordinasikan membeli surat-surat utang negara. Saya lihat di

sini Dua Belas Miliar US Dolar hanya 1 tahun dan Satu Setengah Miliar Euro plus Satu Setengah Miliar Euro. Nah jadi dia bersaing tadi itu kepada sektor ril.

Nah ini makanya untuk saya selalu menyampaikan sejak 2016 waktu itu kalau debat, bahwa untuk saya lihat variabel-variabel kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 2019, 2016 awal saya sampaikan akan stag di sekitar 5%, karena kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan non-fiskal sama kebijakan moneter kurang *match*. Nah ini yang saya lihat artinya *problem* bagi kita semua sebagai anak-anak bangsa, baik yang profesi sebagai bankir maupun juga sektor ril, juga pembuat kebijakan di eksekutif dan juga di legislatif, karena memang ego sektoral masih tinggi.

Kalau saya lihat dari rasio-rasio yang ada di sini memang belum bisa diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lewat dari 5,3%. Kalau 2019 ini ya tidak bakal dapatlah 5% dapat sudah hebat juga kalau kita lihat dari apa yang dibuat oleh pembuat kebijakan non-fiskal, misalnya bicara Menko Perekonomian apa sih yang dibuat?, misalnya Kepala-kepala daerah apa yang dibuat?, terus kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia jalan tidak dilaksanakan oleh bank-bank pelaksana?, ada tidak pelanggaran likuiditas selain penurunan suku bunga? Nah ini yang menjadi saya lihat *problem* di satu sisi harus bersaing dengan pemerintah.

Di sini juga saya melihat ini kebetulan saya kemarin 5 tahun di Komisi Energi, ini tolong nanti dijelaskan oleh PERBINA, ini konsorsium yang memberikan pinjaman ke INALUM untuk membeli saham Freeport Empat Miliar US Dolar, ini nanti tolong dijelaskan konsorsium siapa saja ini? Karena itu kan dibeli juga, padahal itu sebenarnya itu sebenarnya suatu kebijakan yang dipaksakan juga saat itu, tetapi ya namanya kepentingan politik. Kalau saya sekarang kebetulan sudah gabung, biarpun dulu saya dua periode di sini adalah PDI Perjuangan, tapi karena sesuatu hal saya jadi sekarang di Fraksi Partai Gerindra. Ya dulu saya di PDI Perjuangan, tapi sekarang saya sudah kasih masukan, selalu kasih masukan ke Bu Sri Mulyani saya sampaikan kemarin jangan terlalu kencang soal pajak, karena kalau ada perlambatan ekonomi kalau dikencang dia nanti bisa turun menjadi 4% pertumbuhan ekonomi. Jadi harus keseimbangan, tetapi dari sisi kalau ada peluang untuk menaikkan penerimaan negara seperti cukai, saya setuju dinaikkan itu tinggi-tinggi, karena apa, supaya jangan terlalu lebar defisit, jangan terlalu besar utang, akhirnya bersaing lagi ini, untuk bank pelaksana kan paling enak kalau kasih beli kerta surat utang negara, dijamin dia, aman dia, tidak seperti yang dilakukan salah satu asuransi BUMN yang sekarang kita bahas waktu itu mereka investasi di saham-saham yang tidak jelas, sehingga terjadi masalah. Bagusnya dia beli surat utang negara, paling tidak tipis untungnya, tapi tidak anjlok.

Nah itu yang saya lihat ini banyak dilakukan oleh mungkin Bapak-bapak, tapi HIMBARA belum menjelaskan berapa sih investasinya, maksud saya membeli surat utang negara berapa di sini? Memang di sini disampaikan bahwa dari industri perbankan HIMBARA *share*-nya 42,4% kredit, ini kredit untuk apa saja? Ini tolong nanti dijelaskan, apa mungkin juga untuk beli surat utang negara ini berapa puluh persen dari 42% ini. Nanti tolong dijelaskan supaya kita tahu struktur dari

pembiayaan yang Bapak-bapak lakukan. Apakah itu punya potensi mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan diharapkan oleh rakyat dan juga apa lagi pemerintah, karena saya sekarang juga mendukung kebijakan pemerintah agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan di sini, jangan dibalik meningkatkan penerimaan pajak dulu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harusnya dibalik meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan negara, harus begitu. Nah jadi bagaimana kombinasi kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan non-fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah ini kalau Bapak-bapak juga harus pelakunya harus bisa meng-*adjust* itu, cuma masalahnya koordinasinya jalan tidak?

Nah bagaimana pun artinya kita tidak boleh terlalu semua *free* pasar bebas semua, artinya sangat terbuka, harus perlu juga di-*manage* oleh negara dalam arti di kebijakan fiskalnya, sama di kebijakan moneter, kebijakan non-fiskalnya mengarahkannya begitu, bukan bersifat dipaksakan gitu. Ini juga yang saya lihat mudah-mudahan Menko Perekonomian sekarang kebetulan rekan juga di sini dulu di Komisi VII Pak Airlangga Ketua Umum Partai Golkar bisa melihat persoalan itu. Tolong disampaikan agar kebijakan-kebijakan non-fiskal yang dibuat itu bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan *match* dengan kebijakan moneter dan juga para pelaksananya, bank-bank pelaksana dan juga kebijakan fiskal. Jangan nanti misalnya Sri Mulyani Menteri Keuangan memperlebar defisit hampir 3%, akhirnya apa, mesti kita kan tidak ada lagi pinjaman luar negeri, ada pinjaman luar negeri tetapi sudah minus dia Pak Ketua. Jadi kalau kita pinjam misalnya dari luar negeri Seratus Triliun, kita bayar utang Seratus Lima Triliun, tidak pernah lagi lebih banyak pinjaman dari pada angsuran. Jadi kadang-kadang ada yang salah persepsi.

Kalau saya lihat *e-account* biarpun saya sudah lama tidak di Badan Anggaran, saya lihat itu. Jadi apa yang harapannya hanya dari *market*, dari *market* beliau-beliau ini yang berperan. Nah beliau ini mau lihat ini mana yang lebih aman, kita beli saja Surat Utang Negara, nah sedikit-sedikit saja ke ini ke sektor ril. Nah ini menjadi *problem* bangsa ini.

Nah ini kan karena masih banyak BLT-BLT saja ini, kalau dikurangi BLT, lihat saja kalau tidak turun pertumbuhan ekonomi, karena BLT masih banyak dikirim, sehingga naiklah konsumsi rumah tangga, variabel dari makro ekonomi pertumbuhan ekonomi, naiklah tetapi stag di 5%. Kalau diblok semua itu langsung 4% pertumbuhan ekonomi kita Pak Ketua.

Nah ini *problem* saya di sini, makanya saya mendukung pemerintah Jokowi untuk mengupayakan inovasi, kreativitas, memperoleh peningkatan penghasilan negara sepanjang di-*manage* secara ekuilibrium keseimbangan titik-titik atau area keseimbangan itu harus dijaga. Nah ini tentunya bank-bank pelaksana ya kita mengharapkan artinya jangan hanya yang mau enak saja, terjadi inefisiensi akhirnya suku bunga tetap tinggi. 20% Pak Bank Mandiri mana Bank Mandiri di sini? 20% rilnya, karena ...(suara tidak jelas) memang 10%, tetapi kalau rilnya kan itu jadi 20%. Saya bisa hitung Pak 40 tahun yang lalu saya belajar soal itu Pak. Nah jadi

saya lihat begitu. Jadi memang disebut 10%, tahu-tahu 19%, akhirnya kan si ini debitor juga bayarnya segitu rilnya. Nah jadi kan itu semua ini kan makanya tadi istilah Bank Indonesia itu apa literasi, itu memang penting, tapi kan kalau agak di ini apa namanya bukan dibodoh-bodoh ya, memang tidak membodohi, tapi tidak menjelaskan, seharusnya dijelaskan dong, kalau ini biarpun 10% ril saudara bayar ini bunganya 19% gitu dong, nah dikasih tahu perhitungannya itu ada itu strukturnya itu ya. Kebetulan saya dulu cukup tahu soal itu dulu. Saya kan sejak awal jadi politisi soalnya, jadi aktivis, tapi tetap tahu.

Nah itu maksud saya ya makanya literasi yang kata Bank Indonesia kata OJK penting sekali juga soal itu dan bank-bank pelaksana bisa melakukan itu, ini demi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan berdirinya republik di pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa tujuan terbentuknya republik ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mensejahterakan artinya tercapainya kesejahteraan umum, itulah tujuannya soalnya. Makanya konstitusi itu Pembukaan Undang-undang 1945 itu tetap perlu sebagai basis di dalam membuat kebijakan-kebijakan operasional di sektor apapun. Nah itu memang yang sulit Pak para bankir-bankir dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu-ilmu Bapak itu ilmu steril, cuma bagaimana meng-*adjust* dengan apa filosofi kita, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, jadi sebenarnya bisa itu, bisa di-*adjust* sehingga bangsa ini makin kompetitif.

Lihat China dong 20 tahun lebih *double digit* mereka, pertumbuhan ekonomi, di situ hebat mereka, mereka terstruktur memang pembangunan mereka. Mereka tidak langsung masuk kepada *open market*, mulai reformasi *agriculture* dulu, reformasi industri, khususnya *manufacturing*, masuk ke *open market*, masuk ke ...(suara tidak jelas) *investment*, baru masuk ke *financial market*. Artinya bahwa *capital gain* yang bermain di *stock market* itu sudah menjadi variabel untuk pertumbuhan ekonomi mereka, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi naik sebagai variabel dari pada pertumbuhan ekonomi.

Nah ini yang saya lihat masih sulit di republik ini, karena kebanyakan hanya bicara retiroka dan sektoral. Akhirnya saya sangat mengharapkan bahwa kalau misalnya Bank Indonesia menurunkan acuan suku bunga, bagaimana Bapak-bapak langsung meng-*adjust* menyesuaikan dengan cepat. Kalau tidak, nanti ini makin repot ini. Kalau BLT makin dikurangi nanti karena sudah terlalu banyak utang, terlalu lebar defisit, nanti ekonomi kita makin menurun dalam keadaan suasana sekarang ini. Sebenarnya cuma kan kita selalu mengkambinghitamkan ekonomi global, selalu begitu. Dari dulu juga selalu begitu melulu. Jadi saya kadang-kadang apa tidak ada inovasi, sehingga kekuatan internal kita, kita perkuat mesti kita yang mengambil peluang sebenarnya dari sisi kebijakan-kebijakan yang dibuat, itu yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak ini data-datanya HIMBARA kurang lengkap, mungkin karena merasa kuat bank negara. Kalau PERBANAS dia lebih lumayan lebih lengkap ini data-datanya dan juga dari PERBINA ini saya jadi tahu di sini berapa banyak ini surat utang negara, BRI ini rupanya utangnya cukup banyak juga, bukan BRI maksud saya PLN, PLN Tiga Belas Miliar Dolar rupanya ini. Saya

kemarin di sektor energi jadi cukup tahu mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik di PLN ini, karena ini bahaya juga karena kita memerlukan energi *security*, karena tanpa adanya energi *security* keamanan energi bahaya juga kita, artinya suatu negara yang memerlukan energi dari setiap kehidupan kita baik juga bisnis manufaktur maupun kehidupan sehari-hari.

Sementara itu saja Pak Ketua, terlalu banyak yang mau dibahas, ya hanya harapan saya ke Bapak-bapak bank pelaksana agar bagaimana membuat *match* antara kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia. Kalau ada yang kurang dikasih tahu kita bisa diskusi, kita bisa minta kepada Bank Indonesia. Jadi maksud saya bahwa kita di DPR Komisi XI bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI, tetapi fungsi pengawasan itu untuk menemukan bagaimana solusi yang terbaik. Jadi bagaimana mensinergikan komponen-komponen bangsa yang terkait, karena memang DPR itu bisa berkomunikasi dengan yang terkait. Jadi kalau Bapak-bapak mungkin sulit di OJK, kita dengan OJK dengan Bank Indonesia dengan Pemerintah dengan Menteri Keuangan bisa kita sampaikan, tetapi bagaimana agar sektor ril bisa bergerak dan kompetitif mereka di pasar di market, karena sekarang keadaannya seperti itu, seperti Pak Presiden mengeluhkan bahwa investasi perpindahan dari China mulai ada pindah, tapi bukan Indonesia katanya, Presiden saja mengeluh, nah cuma kan ini saya juga konsekuensi beliau agak ambisius untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, otomatis defisit juga melebar, utang juga bertambah. Nah ini memang yang harus ditingkatkan penerimaan negara, kalau tidak ya bersaing lagi ini cari utang Pak Ketua.

Ini kalau Pak Ketua lihat hanya satu tahun saja ini baru yang US dolar, dari yang valas maksud saya, yang HIMBARA belum kasih tahu berapa sih beli ini, nah ini makanya itu lebih terbuka yang PERBINA dikasih tahu di sini, yang HIMBARA belum dikasih tahu berapa beli surat utang negara dari persentase tadi kredit yang diberikan untuk dari sektor industri keuangan atau perbankan.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya yang terhormat Pak Sarmuji, kemudian Pak Rudi Bangun siap-siap.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi mitra sejawat saya yang saya hormati,
Asosiasi PERBANKAN, PERBANAS, HIMBARA, ASBISINDO, PERBINA,
ASBANDA yang saya hormati.**

Pertama, saya ingin konsen dulu ke ASBISINDO karena ini mitra yang nyaris tidak pernah kita undang sebenarnya, jarang-jarang sekali kita bertemu dengan perbankan syariah.

Yang pertama saya senang karena LDR bank syariah itu 88,47% artinya masih ada ruang dibandingkan dengan apa yang ada di HIMBARA dan PERBANAS secara umum. Kalau tidak salah tadi yang lain 94 koma sekian persen, ruangnya sangat sempit dan mungkin itu sudah tidak sehat dari sisi likuiditas.

Kedua, saya ingin menyoroti tentang *sizing* bank syariah. Ini kan ada dari sisi proporsinya bank syariah itu masih kecil kalau tidak salah hanya sekitar 6%, tetapi dari yang pelaku-pelakunya juga belum ada yang sampai Buku IV sebagaimana tadi disinggung oleh kawan saya. Yang ingin saya konfirmasi dari sisi itu apakah ada langkah-langkah yang mungkin bisa diusulkan supaya *sizing* bank syariah itu sampai ke Buku IV supaya juga bisa lebih efisien, *cosh of fund*-nya juga lebih bagus, karena kalau semuanya itu masih kecil-kecil ya sulit untuk bersaing secara sehat menghadapi bank konvensional, meskipun tadi saya lihat pertumbuhannya itu melebihi bank konvensional, tetapi kalau itu *sizing*-nya bagus, besar, modal kapitalnya besar, itu bisa diharapkan pertumbuhannya akan lebih tinggi lagi.

Ketiga, saya selama ini beranggapan bahwa bank syariah ini kurang maju karena barangkali ada ketidak antara orang yang mengenal bank syariah dengan orang yang literate dengan bank syariah itu masih jomplang, tetapi saya mendapatkan data yang cukup mengejutkan sebenarnya antara orang yang mengenal yang inklusi keuangannya itu 9,1% dan literasinya itu 8,9%. Artinya orang yang mengenal orang yang paham itu mendekati dekat sekali dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional inklusinya 75,3, literasinya 37,7%. Separonya ini, separo persis yang antara yang inklusi dan yang literasi.

Nah saya bisa bayangkan seandainya inklusi bank syariah itu 30% ini akan mendongkrak sekali pencapaian literasi bank syariah. Dengan demikian nanti pertumbuhannya juga kita harapkan bisa lebih tinggi. Dari sini saja sebenarnya Ketua kita bisa dapatkan problem bank syariah itu ternyata pada inklusi keuangan syariahnya sangat tidak memadai. Saya ingin menanyakan kira-kira apa yang harus dilakukan dan dukungan apa yang diperlukan dari kita terutama DPR ini supaya dari sisi itu perkembangan bank syariah bisa kita dorong?

Yang kedua, PERBANAS dan HIMBARA, persoalan yang ingin saya soroti sama tentang kalau Pak Andreas tadi tidak mau menyoroti suku bunga, saya juga ikut Pak Andreas tidak mau menyoroti suku bunga, saya ingin menyoroti NIM meskipun sama saja sebenarnya. NIM kita masih terlalu tinggi, kalau tadi Pak Ramson tadi menjelaskan dengan menggebu-gebu betapa beratnya suku bunga kredit ya saya kira-kira samalah dan masa transmisinya yang terlalu panjang antara penurunan suku bunga Bank Indonesia dengan penurunan kredit yang dilakukan oleh Bapak-bapak di PERBANAS dan HIMBARA. Sebenarnya ini agak sedikit aneh, kalau suku bunga kredit transmisinya panjang kalau turun, tapi coba kalau naik, kalau Bank Indonesia menaikkan 0,25 basis poin saja misalkan itu pasti cepat itu. Nah saya minta konfirmasi berapa bulan yang diperlukan selama ini prakteknya

berapa bulan transmisi kalau naik? Kalau turun 6 bulan, kalau naik jangan-jangan cuma beberapa Minggu saja itu transmisinya. Ini tidak berkesesuaian dengan keinginan kita untuk menjadikan perbankan kita sebagai *agent of development* sebagai agen pembangunan yang selama ini kita dengung-dengungkan. Ini menunjukkan bahwa kita memang masih istilah Pak Misbakhun tadi masih *self service* melayani diri sendiri.

Dari HIMBARA tentang dividen kita. Dividen HIMBARA ini saya melihat ini juga tidak terlalu sehat sebenarnya. Perbankan kita kasihan kalau dari sisi ini saya merasa kasihan dengan perbankan yang bergabung di HIMBARA, karena pada tahun 2019 dari setoran pajaknya turun dari 40 ke 33, tapi kalau kita lihat dividennya justru naik 16,3 ke 18,6. Ini menunjukkan perbankan kita memang masih difungsikan untuk setor-setor ke APBN kita supaya kebutuhan terhadap pendanaan APBN kita itu melebihi dari kebutuhan kita untuk melihat perbankan kita menjadi lebih besar. Ini perlu kita perhatikan Ketua, karena mitra kita ini Kementerian Keuangan, meskipun kita Komisi XI yang sebenarnya lebih berat ke APBN, tetapi dalam perspektif ini saya menginginkan kita lebih memperhatikan kesehatan perbankan kita supaya perbankan kita tumbuh lebih baik lagi dengan cara dividen kita jangan terlalu besar untuk setor ke kas negara.

Yang tentang KUR HIMBARA, KUR kita memang HIMBARA tadi melaporkan tentang KUR, ada capaian KUR kita, tetapi saya ingin mengkonfirmasi apakah pertumbuhan penyaluran KUR kita selama ini yang saya yakin setiap tahun itu mengalami kenaikan, apakah berkorelasi dengan pertumbuhan *entrepreneur* kita. Apakah perbankan kita hanya peduli untuk menambah kapasitas orang yang melakukan yang menyita kredit atau juga peduli terhadap tumbuhnya *entrepreneur* kita. Nasabahnya apakah bertambah signifikan signifikan nominalnya. Nah saya minta konfirmasi supaya jelas KUR kita itu betul-betul bermanfaat untuk pertumbuhan terutama pada peningkatan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita yang masih kecil.

Barangkali itu Ketua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini konsen pada kesempatan kali ini. Satu lagi, saya ingin mengkonfirmasi proporsi yang LDR yang 94% tadi itu. Apakah ini hanya dikarenakan karena dana pihak ketiga kita yang melambat melebihi perlambatan pengajuan kredit atau ada faktor lain? Barangkali faktor lain ini kalau tidak bisa kita bicara secara terbuka, saya minta ini dibicarakan secara tertutup.

Yang terakhir, tadi sempat ada ide dari PERBANAS tentang UMKM. Proporsi UMKM jangan disamakan, jangan kira-kira semua perbankan disetarakan beban untuk menyalurkan kredit proporsional 20% minimal ke UMKM. Menurut saya, ini menurut saya kita tidak perlu untuk menurunkan standar, kalau memang belum mampu ya kita *upgrade* gitu, perbankan sekali lagi saya ngambil istilahnya Pak Ramson jangan mau enakanya saja. Ini ada misi negara yang perlu kita laksanakan, ada misi negara yang perlu kita capai. Bahkan kalau yang sudah bisa 20% ya kita harapkan lebih dari 20% tapi jangan diturunkan standarnya. Kalau diturunkan nanti semua orang minta diturunkan. Yang sudah mencapai proporsi 20% pun dia akan mengatakan wah yang lain minta proporsi diturunkan 20% saya juga ingin begitu

supaya kerja kita lebih enak melayani nasabah-nasabah besar saja, kan sama saja uangnya sama, tapi kalau menghadapi UMKM pasti kerjanya jauh lebih besar, tapi karena ini misi negara ya saya mohon supaya standarnya itu jangan diturunkan, kalau bisa justru kita tingkatkan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Silakan yang terhormat Pak Rudi Bangun, kemudian yang terakhir yang terhormat Ibu Anis.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan,
Yang saya hormati seluruh Anggota,
Yang saya hormati di sini ada HIMBARA, ASBISINDO, ASBANDA, PERBANAS,
dan PERBINA.**

Saya PERBINA ini agak bingung tadinya Pak, karena belum pernah ketemu, saya pikir tadi malam PERTINA (Persatuan Tinju Indonesia), makanya saya dimarahi staf itu PERTINA tinju Pak, ini PERTINA, nanti tolong dijelaskan Pak.

Jadi saya konsen pertama mau saya tanyakan kepada HIMBARA Pak, karena HIMBARA ini adalah banknya rakyat plat merah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kinerjanya tentunya Pak. Saya melihat, mendengar dan mendapat masukan dari beberapa kawan-kawan pengusaha, ada beberapa programnya HIMBARA ini seperti katanya saya dengar *LinkAja* gitu ya, ya Pak ya? boleh saya sambil interaktif Ketua? Saya ingin tahu itu *LinkAja* itu maksudnya yang baru-baru itu bulan Maret lalu ya Pak ya? itu bagaimana itu maksudnya program apa atau hanya 4 bank gitu kan untuk menyaingin Gopay segala macam, bagaimana itu yang dikejar progres ke labanya itu bagaimana Pak itu? Jadi itu kan karena di sini saya lihat laporan Bapak pajaknya menurun ya kan pajak dividen ini kan pada turun ini, tapi inovasi Bapak juga kan mulai banyak gitu, itu Pak pertama *LinkAja*.

Kemudian ada juga masukan dari kawan-kawan *Cloud* katanya, *Cloud* HIMBARA, itu untuk apa Pak *Cloud*? Ada program *Cloud* itu mungkin digital itu, nah itu tolong jelaskan apakah untuk mencari laba atau hanya untuk menghabiskan anggaran?

Kemudian Pak juga tentang begini penyaluran kredit di sektor UKM, KUR dan yang menengah ke atas, porsinya sekarang itu berapa Pak di bank HIMBARA ini? Jadi kalau KUR itu sudah kita pahami itu dari Menko. Yang plafon untuk menengah ke atas ini kan lobi-lobi tingkat Pimpinan *commercial banking* gitu, itu bagaimana Pak itu? Bagaimana cara penyalurannya, berapa skala prioritasnya siapa saja gitu kan, karena saya lihat laporan di sini semua kan menurun ini Pak penyaluran kredit menurun, grafiknya semua turun gitu kan, pelambatan dividen menurun, pajak ke pemerintah menurun gitu. Jadi kita berharap Bapak-bapak ini direksi jajaran punya inovasi gitu itu.

Kemudian Pak ada yang di grup HIMBARA ini kan ada namanya BTN Pak. BTN ini ada penyaluran kredit rumah subsidi dan non-subsidi. Yang ada kalangan pengusaha teman saya menanyakan tentang yang subsidi kenapa diberhentikan? Kenapa akhirnya non-subsidi? Apakah uang pemerintah habis? Gitu jadi saya dan kawan-kawan membangun rumah beberapa Ratus, ketika sudah siap mau dibeli sama masyarakat bawah, hitung-hitungannya karena tidak dapat subsidi kreditnya tinggi Pak, akhirnya tidak jadi dijual, mereka tidak berani, itu Pak, masih banyak lagi ini Pak Ketua HIMBARA dan lain-lain, cuma ini nanti ada yang lain-lain kawan-kawan nanya gitu.

Dan juga saya ingin nanya dengan yang namanya PERBINA Pak. PERBINA ini kan bank asing, tentunya mencari laba. Saya ingin tahu apa yang sudah dibuat tentang program bina lingkungan dan CSR-nya Pak? udah dapat untung dari rakyat Indonesia apa yang dikembalikan? Dan juga HIMBARA Pak Pimpinan, Bina Lingkungan dan CSR-nya kami ingin jelas, karena kami wakil rakyat, untuk duduk di sini sulit Pak. Masyarakat lebih kritis, pragmatis dan transaksional. Nah jadi harus nampak apa yang dibuat.

Jadi itu singkat saja dulu Ketua, saya pikir Bapak ini paham, Bapak ini orang-orang pilihan. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Lalu yang terakhir kami persilakan yang terhormat Bu Anis.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Saya Anis Byarwati, dari Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PKS, Dapilnya DKI Jakarta I meliputi 10 kecamatan di Jakarta Timur.

Salam sejahtera untuk kawan-kawan mitra semua dari PERBINA, dari PERBANAS, HIMBARA, ASBISINDO dan ASBANDA.

Ada beberapa pertanyaan tapi saya ingin fokus dulu ke ASBISINDO yang mengurus tentang keuangan perbankan syariah ya. Jadi di tahun 2019 ini kan kita mendengar begitu banyak retorika-retorika, saya sebut retorika itu Pak Pimpinan ya dari pemerintah maupun dari ...(suara tidak jelas) sendiri dari Gubernur Bank Indonesia, dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kyai Haji, saya sebutkan masa retorika bahwa harapan besar untuk ekonomi syariah bahkan sisi besar Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global tingkat dunia, itu visi besar. Bahkan ekonomi syariah akan dijadikan sebagai arus baru ekonomi Indonesia. Itu kata-kata dari Pak Wakil Presiden, bahkan juga ekonomi keuangan syariah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dan ini sepertinya sejalan dengan laporan dari Global Islamic Finance Report (GIFR) Tahun 2019 ini yang menempatkan Indonesia Nomor 1 dalam kepemimpinan dan potensinya dalam perbankan dan keuangan Islam betul Pak ya.

Jadi ini kan seolah-olah memberikan harapan baru begitu bahwa di saat keuangan global itu melambat, disaat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, ada alternatif baru untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih kuat ekonominya yaitu keuangan syariah ya, tetapi jangan sampai ini seperti PHP begitu, PHP harapan palsu karena teman-teman juga sudah banyak menyinggung tentang keuangan syariah, bahwa di masa pemerintahan 5 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini *market share* bank syariah itu relatif stagnan sekitar 5 sampai 6%. Nah ini untuk negara yang punya visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia ini masih sangat jauh.

Nah dalam perspektif ASBISINDO apa kebijakan yang seharusnya menjadi terobosan untuk mencapai sisi tersebut? Jadi kita tidak tarik mundur begitu, tetapi ASBISINDO yang punya korelasi langsung dengan visi ini apa terobosan yang bisa disampaikan.

Kemudian yang kedua, ini masih untuk ASBISINDO, tadi saya tertarik dengan uraian Pak Sarmuji tadi tentang tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah. Ini memang benar sekali saya sepakat dengan beliau dan ini menunjukkan memang keuangan syariah atau ekonomi syariah itu belum populer di masyarakat kita yang mayoritas muslim. Tadi Pak Misbakhun juga menyampaikan gitu apakah kalau masyarakat muslim harus kaya begitu gitu. Kalau saya sih ya pantas gitu, kita muslim ya pantaslah kalau kita yang mengusung dan laporan yang dari GIFR tadi itu menempatkan kita Nomor 1 loh sebagai pusat keuangan syariah dunia. Nah ini hubungannya dengan tingkat literasi dan inklusi ini usulan untuk ASBISINDO, kan kita melihat bahwa perlu ada yang memperkenalkan dengan bahasa populer, apa itu keuangan syariah. Perlu ada yang bisa menjadi *influencer* dengan jutaan *follower* untuk bisa mengartikulasikan keuangan syariah itu seperti apa dengan bahasa yang populer, dengan bahasa yang menarik sehingga masyarakat menjadi tahu oh ini adalah jawaban ya, oh ini adalah seperti kata-kata Pak Wakil Presiden ya dia bisa

jadi arus baru. Jadi kata-kata pemerintah itu tidak hanya retorika, tetapi dia bisa memenuhi opini dari masyarakat kita, bahwa memang ekonomi syariah ini tumbuhnya bisa menjadi alternatif baru begitu ya untuk ekonomi nasional Indonesia.

Jadi mungkin juga perlu ada wajah-wajah baru di ekonomi syariah karena memang menurut pengamatan Menteri Keuangan sendiri Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan di depan wartawan bahwa dalam 10 tahun terakhir belum ada wajah-wajah baru di keuangan syariah yang mampu mengaktualisasikan ekonomi keuangan syariah itu sebagai dengan bahasa yang populer dan menarik gitu. Nah kalau ini tentu hubungannya dengan tingkat literasi dan tingkat inklusi. Kalau masyarakat belum paham, belum mamahami tingkat literasinya kurang, akibatnya inklusinya juga kurang. Ini memang kalau dilihat dari datanya tingkat literasi keuangan syariah itu 8,9 kemudian inklusi keuangan syariah itu 9,1 ini kan memang dekat ini. Jadi kalau orang-rang paham ini tentu akan membuat mereka bisa menjadi nasabah dari perbankan syariah.

Nah kemudian secara umum *problem* yang dihadapi oleh bank syariah sama dengan bank dengan skala ekonomi yang lebih kecil, sehingga profitabilitas dan efisiensi juga lebih rendah. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas bank syariah jauh lebih rendah dari bank konvensional, juga rasio biaya operasional yang lebih besar dibanding dengan bank konvensional. Sehingga menjadi sangat penting untuk meningkatkan skala ekonomi bank syariah melalui peningkatan kapasitas permodalannya. Nah pertanyaan untuk ASBISINDO, bagaimana komitmen dari para pemegang saham dalam persepsi ASBISINDO terkait permodalan ini?

Nah kemudian bank syariah juga menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan. Terlebih pada saat yang sama pemerintah juga memacu penerbitan SUKUK dan SUKUK ritel dalam jumlah yang signifikan dengan imbal hasil yang cukup tinggi dan tentu hal ini akan berdampak pada migrasi dana dari bank syariah. Bagaimana analisis ASBISINDO terkait hal ini dan dampaknya terhadap resiliensi bank syariah dan saran kebijakan untuk meningkatkan likuiditas bank syariah.

Nah kemudian yang terakhir untuk ASBISINDO, saya ingin bertanya bagaimana itu tadi Pak Satori juga tanya Bank Muammalat yang sudah kita perbincangkan dan sudah diketahui oleh publik juga yang mengalami masalah yang cukup besar atau bahkan sangat besar yang hampir ditutup sempat ditutup kasusnya tetapi publik sudah makin tahu bagaimana perkembangannya dan apa yang bisa dilakukan oleh ASBISINDO.

Dan kemudian untuk HIMBARA, tentang KUR tadi. Tadi juga sempat disinggung oleh teman-teman tentang KUR tadi. Ini saya ingin apresiasi dulu ya, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Oktober di data ini ada Seratus Sembilan Belas koma Lima Triliun dengan jumlah debitur mencapai Empat koma Tiga Puluh Empat Juta debitur ya, ini tentu sangat kita apresiasi karena penyaluran ini kalau dihitung per Agustus itu sudah mencapai Tujuh Puluh Dua koma Enam Puluh Lima persen dari target ya, ini tentu apresiasi dan Bank BUMN menempati 3 penyalur KUR yang utama ya, hanya saya beri catatan di sini Bapak-bapak penyaluran KUR ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa ya, 54,9% KUR itu disalurkan ke pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur 4 provinsi

wilayah Indonesia Timur Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu hanya 1,6%. Nah bagaimana strategi dari HIMBARA ini untuk penyaluran kredit KUR agar wilayah Indonesia bagian Timur ini bisa terjangkau KUR-nya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir Bu Vera.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jangan lama-lama Bu ya, kita jam satu seperempat kita sudah sepakat itu.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Mohon maaf tadi saya terlambat karena ada kegiatan dari Karawang dari Dapil saya, jadi saya langsung meluncur ke sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vera Febyanthi, saya dari Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Barat VII, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Purwakarta. Ada beberapa saya lihat di sini asosiasi yang masih saya kenal, namun ada yang baru yang belum saya kenal.

Langsung saja saya ingin bertanya kepada HIMBARA, ketika saya melihat data yang diberikan kepada kami ini, bahwa suku bunga perbankan itu kan masih di atas 10% yang saat ini Bapak-bapak dari pihak asosiasi lakukan, baik itu konsumsi, investasi dan modal kerja. Dengan adanya penurunan Bank Indonesia 7 day reverse repo yang kemarin kita sempat tanya ke Gubernur Bank Indonesia di angkat 5%, namun pihak perbankan nasional dan swasta cenderung masih belum bisa menekan di angka satu digit.

Pertanyaan saya sangat simpel, sebetulnya tantangan apa sih yang menyebabkan perbankan nasional itu tidak mampu menurunkan suku bunga kredit di bawah 10% atau satu digit dan berapa biaya-biaya atau *cost* penurunan suku bunga tersebut? Karena kita tahu kondisi pasar saat ini memang sangat sulit dan ketahanan perbankan kita memang kita lihat ada gejala dari faktor global ekonomi, sehingga setiap perbankan cenderung tidak mau menurunkan suku bunganya, walaupun dari Bank Indonesia sudah terus melakukan penurunan suku bunga. Apakah itu karena kondisi rasio kreditnya atautah memang DPK-nya atau memang karena kendala iuran ataupun pungutan-pungutan di luar itu yang sehingga tidak terjadinya kompetitif terhadap perbankan?

LPS kita tahu udah memungut, OJK yang terlalu banyak pungutan-pungutan seperti iuran registrasi maupun ada dana denda dan keterlambatan terhadap laporan itu pun juga dikenakan denda, dan ada sanksi di atas sanksi pun juga ada denda. Jadi tolong Bapak-bapak yang ada di sini dari pihak perbankan sampaikan saja kepada kami, karena kita dalam rangka akan melakukan perubahan Undang-undang OJK. Tidak usah takut Pak sampaikan, karena kita akan memberikan dukungan politik di sini, karena kami memanggil Bapak-bapak di sini dari pihak perbankan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala yang terbesar apa sih yang selama ini yang kadang pada yang saya ketahui di tahun 2004 saya masih di Komisi yang sama, suku bunga bisa bersaing dan mereka apa yang sudah diturunkan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya penurunan suku bunga, mereka tidak akan jauh berbeda penekanan itu, tapi ketika lahirnya OJK dan lembaga-lembaga lain seperti LPS. Kalau LPS itu memang wajib ya, tapi ada iuran-iuran atau pungutan-pungutan yang menyulitkan mereka itu berapa sih kira-kira setiap tahunnya dari pihak perbankan harus mengeluarkan? Tentunya tergantung dari bukunya, yang kita tahu Buku I, Buku II dan lain-lain. Nah apakah itu menjadi salah satu kendala terbesar saat ini?

Jadi kita nanti akan ada sesi khusus ketika sudah masuk dalam Prolegnas kita akan memanggil kembali pihak perbankan untuk menjadi menyampaikan persoalan-persoalan atau memberikan meminta masukan khususnya dalam rangka melakukan revisi Undang-undang OJK. Saya yang pertama kali menyampaikan bahwa OJK ini harus direvisi sesegera mungkin seiring dengan kendala-kendala dan keluhan dari pihak perbankan, mungkin Bapak-bapak di sini khawatir untuk menyampaikan, tapi kita tidak, kita berikan forum ini untuk secara bebas untuk menyampaikan hal tersebut. Itu dari saya yang pertama.

Dan yang kedua mengenai ASBISINDO, perbankan syariah. Kita tahu bahwa aset perbankan syariah saat ini mencapai 11,45%. DPK-nya bagus 13,04%. Ini menunjukkan bahwa tidak bagus tapi lumayan. Pertanyaan saya sangat simpel, kenapa salah satu perbankan syariah mengalami likuiditas? Apa sih yang menjadi kendala? Sementara kita lihat aset perbankan syariahnya juga bagus gitu loh, DPK-nya juga 13,04%, tapi ada salah satu tidak usah saya sebutkan memang ini menjadi isu utama, apa yang menyebabkan terjadinya mengalami likuiditas dan masih di perbankan syariah mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Kita tahu bahwa Minggu lalu Bank Indonesia sudah yang kesekian kali ya 6 kali melakukan Festival Ekonomi Syariah.

Nah yang pertanyaan saya, bahwa ketika kita mau melakukan penetrasi terhadap ekonomi syariah, tentunya yang kita *approach* tentunya adalah pihak-pihak pesantren. Di Dapil saya itu banyak sekali pesantren, hampir semua yang ada di sini banyak pesantren. Apa kontribusi Bapak-bapak ini khususnya kepada keuangan inklusif yang ada melalui mediasi atau intermediasi terhadap pihak pesantren? Itu yang harus saya tanyakan, karena bagaimana korelasinya ketika Gubernur Bank Indonesia sudah *me-launching* program tersebut, apa yang Bapak-bapak telah lakukan biar terjadi korelasi terhadap program tersebut? Karena ini merupakan program saya di luar pemerintah tapi kita mendukung kalau berhubungan dengan

keuangan atau ekonomi syariah, itu khususnya pada pihak pesantren saya mendukung penuh, ini programnya Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf yang harus kita dukung penuh gitu.

Dan yang terakhir PERBINA, saya melihat angka bahwa di sini anda mengatakan ...(suara tidak jelas) *supporting FDI*. Namun saya tidak mendapatkan angka berapa besar *foreign direct investment* dapat terkait dengan kontribusi bank asing atau FDI yang anda parkir yang ada parkir di Indonesia saat ini. Yang saya lihat di sini adalah data-data bahwa bank perbankan asing melakukan *joint lead manager* terkait beberapa proyek pemerintah, tapi kira-kira terhadap FDI-nya sendiri itu berapa sih kontribusinya yang *the last four years* atau dari 4 tahun terakhir itu kita ingin lihat mana yang lebih unggul di tahun-tahun selama 4 tahun *the last four years*, karena kita akan tahu trennya seperti apa. Apakah yang mengalami penurunan itu di mana di sektor industri apa? supaya kita bisa melakukan identifikasi ataukah memang sistem perpajakannya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa perpajakan itu memang membuat mereka kesulitan atau terjadinya kesulitan dalam rangka melakukan regulasi atau koordinasi, padahal pemerintah sudah melakukan sistem register *one submit single* apa sih namanya yang di Kementerian Perekonomian apa sih pokoknya gitu lah, itu intinya itu kan sudah mempermudah ketika investasi masuk ke Indonesia itu sangat memudahkan, walaupun itu baru 1 tahun terakhir, belum terlalu digalakan. Apakah itu salah satu kendala? Ini yang menjadi kendala utama ketika asing itu sulit untuk memarkirkan uangnya di sini untuk menginvestasikan sebuah investasi yang besar, bahkan banyak di beberapa Dapil saya itu terkena pabriknya Pak dan di Cikarang, banyak yang sudah henggang dari situ. Nah ini yang kita harus identifikasi terhadap suatu kendala-kendala tersebut supaya kita bisa melahirkan suatu keputusan atau dukungan politik bersama di sini.

Dan yang terakhir, mengenai KUR. Kepada siapa saja yang ada di sini PERBANAS, HIMBARA, ASBISINDO ataupun PERBINA. Kontribusi apa yang Bapak lakukan terhadap KUR? Sekarang kita tahu bahwa angka KUR itu saya mengalami sendiri Pak, ketika saya turun ke Dapil, itu petani Gapoktan harus diminta ini, ini salah satu memang bukan yang akan kita tanyakan kepada pihak asosiasi, tapi biasanya langsung kepada perbankan. Harus ada regulasi yang terintegrasi terhadap pinjaman KUR yang dilakukan oleh pihak perbankan, karena ketika saya turun Pak, itu Gapoktan itu harus mereka itu tidak semua masyarakat kecil itu *bankable* hingga saat ini hampir 15 tahun itu masih mereka sangat kesulitan mendapat pinjaman KUR. KUR itu dilahirkan pada tahun 2004, kita tahu sekali dan ini sampai sekarang mereka sulit sekali dan memang akhirnya hanya bisa didapatkan dari orang yang itu-itu saja. Tidak semua masyarakat di tingkat pedesaan itu tahu bagaimana mereka mau melakukan pinjaman. Kadang mereka itu kan biasanya ada kelompok usahanya yang meminjam yang menjemput bola, tapi cenderung saya lihat bahwa perbankan nasional ini hanya keinginannya tertarik kepada para pinjaman yang besar-besar dibandingkan terhadap usaha kecil menengah, UKM, khususnya kepada KUR. Nah belum lagi mereka harus menggadaikan motornya dan lain-lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi padahal

berangkat itu dari desa Pak. Sekarang kita ini kan kembali lagi kebalik lagi bahwa ekonomi itu harus kita bangun dari desa semenjak dilahirkannya ada dana desa, tapi sekarang ini *stagnant* karena dana desa yang mereka lakukan hanya untuk perbaikan infrastruktur, tetapi untuk melakukan stimulus terhadap program pangan, itu juga sulit sampai saat ini.

Jadi saya ingin kontribusi apa dari para asosiasi ini memberikan bantuan atau sistem integrasi yang mempermudah mereka. Kita tahu pada tahun 2004 mereka sama sekali tidak bisa masuk ke bank, mereka buka sandal kalau masuk bank, sampai sekarang ini masih ada yang seperti itu Pak, sehingga dulu saya ingat Bank Danamon itu datang ke pasar-pasar mereka menjemput bola. Ini yang tidak dilakukan oleh perbankan nasional, sangat disayangkan, harusnya mereka datang dengan memakai baju yang seperti orang pasar, padahal mereka dari pihak perbankan, itu harus dilakukan seperti itu penetrasinya. Jadi ketika mereka ingin memberikan pinjaman, padahal mereka ini orang-orang yang *onus*.

Jadi saya mohon pihak perbankan harus bisa memberikan harus mengatur suatu regulasi yang baik ketika untuk menurunkan KUR, jadi jangan segan-segan Pak, karena memang ini program pemerintah ini adalah sebuah proyek ataupun kita bersama. Kalau untuk persoalan KUR ini dari 15 tahun ini saya melihat sulit sekali dan cenderung tidak tertarik pihak perbankan untuk memberikan bantuan yang secara *all out*, padahal kita tahu *buffering* utama pemerintah dalam kondisi ekonomi yang saat ini sedang terhimpit, padahal KUR itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi itu yang akan saya tanya terus nanti di Komisi XI terhadap kebijakan implementasi KUR dan proyek UMKM, khususnya kepada PERBANAS dan perbankan-perbankan nasional, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada PERBINA gitu loh.

Persoalan masalah *environment* itu juga bagus Pak, tapi juga harus menyentuh KUR, jadi bekerja sama Linked dengan apapun jadi nanti kita tahu memang Bapak-bapak ini tidak masuk tidak boleh sampai ke kabupaten, tapi bisa memberikan sebagai pinjaman dana pihak ketiga yang disalurkan kepada beberapa perbankan nasional. Jadi ada kontribusinya yang akan diatur.

Terima kasih dari saya.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Demikianlah tadi Pak pertanyaan 13 penanya dari Anggota Komisi XI DPR RI sesuai dengan kesepakatan mungkin kita *break* sampai jam 14.00 ya, jam 14.00 cukup, kemudian yang akan dipimpin oleh Pak Achmad Hatari untuk Bapak memberikan jawaban, kalau penanyanya tidak ada bisa dilanjutkan dengan tertulis, bisa Pak ya?

INTERUPSI:

Usul Pak, boleh Pak?

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

INTERUPSI:

Boleh kita sebagian jawabannya nanti tertulis Pak?

KETUA RAPAT:

Oh iya, semua jawabannya tertulis, tapi kalau yang menurut Bapak bisa jawab secara *highlight*, jawab secara *highlight* saja, sisanya dengan tertulis, bisa Pak? saya ya.

INTERUPSI:

Pak kalau boleh kita mungkin dalam 5-10 menit ini kita jawab dan sisanya menyusul kalau boleh.

KETUA RAPAT:

Oh begitu.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Pimpinan, bagi yang sudah meninggalkan ruangan tidak perlu dijawab bisa tertulis, tapi yang ada di sini tolong dijawab.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar Bu Vera.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Sebaiknya kita putuskan dulu ini untuk jawabannya itu dilakukan secara terbuka atau tertutup, kan banyak menyangkut masalah kebijakan. Jadi jangan hanya kemudian nanti sifatnya jawabannya hanya formalitas ya, yang sifatnya hanyalah sifatnya umum, tidak akan nanti, karena kita mau ingin mendapatkan masukan dan tadi banyak sekali usulan mengenai kebijakan fiskal yang saya kira

kalau disampaikan secara tertutup mungkin lebih ya kita ini lebih akan mudah melakukan pendalaman.

KETUA RAPAT:

Baik, baik.

Lebih baik tertutup Pak?

Tertutup *oke*. Jadi kita sepakati kita *break* sampai jam 14.00 WIB, kemudian masuk dipimpin oleh Pak Achmad Hatari dengan sidang tertutup, bagaimana Pak setuju?

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Teman-teman jawabannya memang tertutup, tapi mungkin kita secara garis besar kita selesaikan.

KETUA RAPAT:

Oh mau langsung, Bapak mau langsung?

Oke baik.

Silakan Pak saya persilakan Pak Hatari dia mau jawab langsung, setelah itu baru istirahat. Tertutup dulu sekretariat. Saya skors 3 menit untuk mensterilkan Pak, tertutup kan Pak, ya. Langsung tertutup saja, sekarang tertutup saja, skors 3 menit saja kita ini kan sterilkan kemudian baru kita buka. Saya skors 3 menit Pak ya.

(RAPAT DISKORS 3 MENIT)

KETUA RAPAT/WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Dr. ACHMAD HATARI SE., M.Si./F-P.NASDEM):

Baik, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Kesepakatan tadi bahwa kita lanjut lagi sampai dengan pukul 14.00 gitu Pak ya. Saya tawarkan kepada Anggota Komisi XI jam 14.00 kita selesai.

Terkait dengan jawaban tertulis yang nanti akan disampaikan kepada kita, saya tawarkan kepada Anggota semuanya kira-kira kita berikan tenggang waktu berapa hari jawaban tertulis sudah kami terima gitu. Jadi silakan. 1 Minggu ya? Bapak dari PERBANAS dan semuanya kesepakatan dari Anggota Komisi XI bahwa setelah hari ini seminggu lagi jawaban tertulis dari Bapak-bapak sekalian sudah diterima di Sekretariat Komisi XI DPR RI.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Pimpinan, mohon maaf Pimpinan.

Saya boleh usul tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi ada gagasan-gagasan masukan, itu yang justru menurut saya justru lebih penting malah itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, jadi kita punya alokasi waktu masih kurang lebih 15 menit, kita tidak akan tambah berapa menit lagi tidak, sudah sepakat dan 7 hari setelah ini kami berharap jawaban tertulis sudah diteima Komisi XI, baik ada lagi yang mau bertanya lagi yang belum kebagia bertanya, ada lagi yang ingin mengembangkan pertanyaan saya persilakan dari Anggota Komisi XI.

Pak Rudi.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya tadi sedikit ada kekurangan yang saya tanyakan kepada Pak HIMBARA Dirut BRI tentang aset satelit Pak. Satelit itu kan manfaatnya banyak begitu yang dulu zaman Pak Asmawi. Jadi saya ingin tolong dijelaskan Pak bagaimana itu tentang perkembangannya operasionalnya sampai sekarang penggunaannya dan saya mendengar.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Interupsi saya Pak.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Jadi dan saya mendengar di 2023 kan akan ada lagi kita beli Pak, nah itu maksudnya bagaimana manfaat, bagaimana progres itu saya tadi lupa menanyakan Pak ke Pak Sunarso, terima kasih. Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Pak Rudi.

Ada lagi yang mau menambahkan?

Pak Andreas?

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Pimpinan, izin.

Tidak perlu ada tambahan Pimpinan, biar dijawab yang tadi Pimpinan ya. Tidak perlu ada tambahan pertanyaan, biar dijawab yang tadi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah tadi saya sudah bilang, kita tidak buka lagi sesi baru mulai dari baru lagi tidak, apektasinya tinggal 10 menit gitu. Jadi bagi yang ingin menambahkan satu atau setengah menit silakan, tapi begitu pukul 14.00 saya ketok palu, 1 Minggu kita terima jawaban.

Silakan.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya akan men-*summary*-kan jawaban dari semua pertanyaan ataupun mungkin ide-ide yang perlu disampaikan sebagai masukan.

Yang pertama mungkin koreksi dulu bahwa laba dan dividen yang kita proyeksikan akan kita setor tidak turun, karena yang tercantum di situ turun itu adalah karena itu sampai posisi September saja Pak Rudi gitu. Jadi kita masih tetap komit untuk memberikan sesuatu yang meningkat gitu. *Cloud* dan *LinkAja*. *Cloud* itu adalah sebenarnya server saja sebenarnya yang menggantikan sekarang, sehingga nanti itu diharapkan untuk efisiensi. *LinkAja* juga arahnya sebenarnya untuk efisiensi sebenarnya.

Kemudian sekarang masuk materi yang menyangkut masalah rangkuman dari semua konsen tadi. Yang pertama adalah apakah *banking system* kita sudah efisien. Jawabannya saya harus sampaikan bahwa kami dari HIMBARA menyatakan bahwa memang belum. Kenapa demikian, karena masih terlihat bahwa di *spread* yang lebar, kemudian NIM yang tinggi, suku bunga yang tidak kunjung turun meskipun 7 day reverse repo turun. Penyebabnya apa, penyebabnya kita sudah survey juga, kita sudah dapat masukan dari berbagai investor bahwa memang di negeri kita itu *operational cost* itu paling tinggi, di regional mungkin, apa lagi kalau dibandingkan di internasional paling tinggi, kenapa, karena memang kita satu-satunya negara dengan negara yang besar seperti ini dengan kondisi kepulauan yang ...(suara tidak jelas) yang luar biasa dan itu nanti cara mengatasinya bahwa semua industri perbankan sedang mengarah untuk meningkatkan efisien di *operating cost* ini ya dengan digital gitu, digital nanti jawabannya, jawabannya itu nanti digital.

Yang kedua, konglomerasi keuangan untuk apa sebenarnya. Konglomerasi keuangan memang dimaksudkan untuk dua hal. Satu diversifikasi *income*, yang kedua adalah *spreading risk*, maka kuncinya adalah tadi ada yang menanyakan ini untuk apa, kuncinya adalah supaya tidak kanibal segala macam, maka perusahaan anak itu tidak boleh main sama dengan induknya, karena itu redanden gitu, jadi itu. Jadi tetap kuncinya adalah untuk diversifikasi *income* dan *spreading risk*, ini untuk *sustainability* dari pada perusahaan ataupun konglomerasi keuangan itu sendiri.

Yang ketiga yang terakhir, apa sebenarnya yang diperlukan untuk mendorong peranan industri perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang jelas kita butuh likuiditas Bapak, kita butuh likuiditas dan untuk masalah likuiditas ini kalau dibilang sekarang ini kita ketat apa tidak gitu, sekarang ini ketat apa tidak, dibilang tidak ketat, dibilang ketat kita masih menemukan kredit *double digit*. Dibilang longgar ...(suara tidak jelas) kita 94% gitu dan itu fakta dan itu realitas. Kemudian masih ada tidak peluang untuk menambah likuiditas pembangunan ini ada. Tidak semua uang di republik ini masuk ke dalam sistem dan yang tidak masuk ke dalam sistem itu saya bagi dua yang besar-besar, mungkin ada di luar ya, maka kemudian cara memancingnya dengan idenya Pak Tigor dari PERBANAS dari PERBINA bahwa harus ada produk-produk yang atraktif dan kredibel gitu untuk supaya orang naruh uangnya di dalam negeri dan masuk diputar dalam likuiditas pembangunan.

Yang kedua, kalau ini urusan saya, urusan kami, masih banyak uang-uang receh di *wet market*, di pasar-pasar basah, pasar-pasar becek belum masuk dalam sistem likuiditas dan ini yang harus kita tangkap dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan nanti kuncinya juga mendigitalkan transaksi, mendigitalkan *cashless*-kan transaksi, saya kira ini yang perlu kita dorong. Jadi kebijakan-kebijakan yang ke arah sanalah yang mesti kita perkuat ya.

Terus kemudian itu dalam rangka meningkatkan *value city of money*, *value city of money* harus kita dorong, harus kita tingkatkan supaya kalau ada 7 day reverse repo turun, maka transmisinya lebih cepat. Sekarang kenapa kok lamban, karena begini, secara konvensional bunga diturunkan hari ini, tapi kita masih menggunakan data paling cepat jangka waktunya 1 bulan paling cepat, masih ada deposito yang harganya mahal dengan jangka waktu 6 bulan. Maka kemudian kalau dana-dana model itu nanti menjadi plot dari pada transaksi dan itu mempercepat *value city of money*, termasuk mendigitalkan transaksi-transaksi tadi.

Kemudian yang berikutnya, jangan ada duit juga nganggur tidak bisa diputar untuk membiayai pembangunan. Saya ingin menyampaikan bahwa GWM memang sudah turun, tetapi GWM 5% itu duitnya itu untuk apa? memang untuk meng-*cover* resiko. Boleh tidak kalau misalnya untuk meng-*cover* resiko itu katakanlah sebagian dalam bentuk surat berharga, baik surat berharganya negara atau apa, sehingga bank mencadangkan *cover* resiko itu tidak semuanya dalam *cash* tetapi ada dalam bentuk surat berharga. Surat berharganya pasti surat berharga pemerintah yang setara dengan kas dan kemudian begitu uang ada di *government speed up* belanja negara itu yang harus kita dorong untuk meningkatkan *value city of money* tadi itu dan kemudian untuk itu butuh sinkronisasi kebijakan antara yang mengeluarkan kebijakan tentang suku bunga yang *authorized* untuk mengeluarkan kebijakan suku bunga dan juga fiskal tadi konsennya Bapak-bapak sekalian. Yang lain mungkin di luar perbankan kita sekarang pertumbuhan kita di-*drive* oleh konsumsi, tetapi yang dikonsumsi itu barang dari mana. Kalau yang dikonsumsi itu barang dari import, ya memang pertumbuhan ekonominya tumbuh di-*drive* oleh konsumsi dan kemudian inflasinya dijaga rendah, tapi inflasi dijaga rendah karena barang-barang dipenuhi dari barang import. Jadi saya pikir mungkin mesti ada gerakan bersama-sama yang

oke konsumsi silakan tetap tumbuh menjadi *driver*-nya pertumbuhan, tetapi yang dikonsumsi adalah harusnya memang produk-produk dalam negeri.

Saya kira itu Pak terima kasih.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak satu lagi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Berapa sih HIMBARA memberikan kredit ke surat utang negara? Kalau tadi kan apa itu kasih tahu.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

Satu lagi BTN tadi Pak tolong dijawab BTN yang mempunyai subsidi tadi Pak.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Pak Ramson, total kredit yang kita cantumkan di data itu adalah benar-benar kredit, di luar surat utang negara. Jadi itu memang 100% kredit untuk ke *purpose* produktif maupun konsumtif, tapi bukan untuk surat utang negara, karena surat utang negara dibuku sebagai kredit, saya kira itu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau SUN?

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Kalau SUN Seratus Lima Triliun dan itu bagian dari pada likuiditas tadi, makanya kemudian kalau itu bisa digunakan saja sebagai pemenuhan GWM, saya pikir akan lebih cair lagi likuiditas kita seperti itu.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Saya ingin penegasan saja, karena ini masukan dari pelaku industri sangat penting di dalam kita untuk membahas alternatif-alternatif kebijakan dengan pihak pemerintah.

Pertama, apakah benar terkonfirmasi bahwa pelambatan ekonomi kita ini memang terkonfirmasi karena penurunan *demand*? ini penting ini, karena kalau itu berarti kan urusannya daya beli ini tadi. Ini karena selama ini kita selalu di Komisi ini ya berdebat itu ini karena ini, jadi kami mohon konfirmasi, sehingga kami pada saat berbicara dengan pemangku kebijakan jelas dasarnya gitu, karena Bapak-bapak yang menghadapi di lapangan sebagai pelaku usaha itu Nomor 1.

Terus kedua adalah kita tahu tadi pertanyaan yang paling penting adalah juga *shortfall* perpajakan ini akibatnya bagaimana nanti? Apakah dengan nambah pemerintah akan nambah utang lagi SUN-nya itu menambah likuiditas semakin ketat, ini sebelum bicara yang tadi yang Pak Sunarso bilang kan menengah, tapi kita ingin karena jangka pendeknya bagaimana ini ya, likuiditas tadi dikatakan kalau GWM 94% saya kira juga ini, dan mohon juga dari PERBANAS itu kondisi likuiditas per bukunya kan beda ini, mungkin Buku III akan sangat ini, dan ini yang akan sebetulnya mempengaruhi industri, karena kalau mereka kemudian mencari penyelesaian jangka pendek untuk likuiditasnya, akhirnya mereka menawarkan dalam tingkat bunga yang akan lebih tinggi. Ini kan akan seperti lingkaran setan saja. Jadi kami mohon itu disampaikan.

Dan berikutnya adalah saya kira memang banyak sekali yang tadi ide yang tadi mengenai *offshore banking* saya kira itu menarik sekali, karena tadi saya sampaikan yang uang dari Hongkong itu sudah ke Singapura Dua Puluh Lima Miliar Dolar kita selalu terlambat. Jadi sebaiknya saya tahu karena waktunya dan Bapak-bapak waktunya juga sangat pendek sekali mengingat harus kembali ke kantor.

Kita saya usulkan untuk nanti jawaban tertulis tapi pendalamannya kalau setuju kita tolong mungkin cari *Forum Group Discussion (FGD)* itu jauh lebih efektif masing-masing supaya kita benar-benar pada saat kita berbicara dengan pemangku kebijakan baik di fiskal moneter, kita itu sudah punya bahan dari pelaku industri. Jadi bukan hanya pemerintah mengatakan oh bukan karena penurunan daya beli, bukan karena *demand*, ini kan kita jadi selama ini kan tidak punya istilahnya itu *counter argumentasi* yang sesungguhnya bagaimana sih di lapangan. Jadi sebaiknya ini saya kira adalah hal yang bagus bahwa sebelum kita bertemu dengan pemangku kebijakan, kita sudah dapat masukan dari pelaku industri yang mengalami. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

Silakan, nanti siap-siap Pak Rudi terakhir.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Narso, saya tadi menarik Pak keinginan Bapak usulan untuk GWM itu salah satunya tidak hanya dalam bentuk *cash*, tapi juga ditopang oleh surat berharga, *mix*-nya berapa Pak? tidak Pak, karena kita ini sangat sering diskusi dalam forum FGD dengan Bank Indonesia seringkali bahkan hampir tiap dalam setahun itu 3 kali kita membahas GWM Pak dalam rangka mengetahui operasi moneter mereka. Kita ingin tahu Pak, termasuk saya dan Pak Andreas ini sering mendiskusikan soal GWM ini seberapa efektif sebagai salah satu instrumen moneter dalam rangka melonggarkan atau mengetatkan likuiditas ini dari sisi instrumen kebijakan dan saya ingin Pak menguatkan lagi yang disampaikan oleh Pak Tigor terkait mengenai pelambatan ekonomi Pak. Baru sekali ini Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia mengakui bahwa terjadi pelambatan. Pelambatan ekonomi di ruangan ini Pak diakui ketika kita membahas mengenai perkembangan makro ekonomi kita dan kalau penurunan ini adalah penurunan *demand* dan terkonfirmasi, ini menjadi penurunan yang terstruktural Pak, karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh faktor *consumption*. Kalau ini sampai terjadi seberapa persen sih sebenarnya ini menjadi sangat serius dan akan bersifat jangka panjang, karena apa, *demand* itu kalau terjadi struktural *recovery*-nya itu akan lama dan ini akan perlu kita diskusi lebih mendalam Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Misbakhun terima kasih.
Terakhir Pak Rudi.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Saya 1 detik saja Ketua.
Yang tadi Pak Narso, mengenai satelit dan subsidi BTN tadi.

KETUA HIMBARA (SUNARSO):

Baik.

Yang satelit Pak, satelit kita luncurkan Juli 2016 dengan jumlah 45 *transponder*, 45 *transponder* terdiri atas 36 itu Ku Band dan kemudian eh C Band, dan kemudian yang 9 itu Ku Band. Ku Band itu sebenarnya lebih untuk video gitu ya dan kemudian dulu kita rencanakan itu terpakai mungkin sekitar 25-an dan selebihnya kalau tidak terpakai kita harus kembalikan kepada pemerintah untuk digunakan oleh pemerintah, tetapi dengan perkembangan tuntutan digitalisasi dan supaya kita bisa menjangkau kepada masyarakat sampai terluar, terdepan, tertinggal itu bisa dijangkau dengan transaksi perbankan, maka ternyata sekarang kita hitung kira-kira dengan nambahnya jumlah nasabah BRI, nasabah BRI sekarang

sudah Enam Puluh Juta lebih Pak gitu dan itu termasuk yang di pinggir-pinggir tadi itu, itu diperkirakan tahun 2023 itu, itu yang 45 *transponder* itu terpakai semua gitu, selain yang sudah dialokasikan kepada kepentingan pemerintah, maka kemudian kita merencanakan tetapi merencanakan ini bukan berarti kita harus beli, bisa jadi nanti mungkin ada BUMN yang meng-*operated* dan melaksanakan itu, tapi intinya akan kekurangan kira-kira seperti itu. Kalau ditanya bermanfaat tidak, bermanfaat Pak, sekarang buktinya kita bisa menjangkau ke mana-mana dengan itu. Di laut pun sekarang bisa pakai teras kapal itu karena kita pakai satelit, tetapi tidak secepat kalau pakai fiber optic. Kalau di Jakarta tidak perlu Pak satelit, di Jakarta cukup fiber optic, saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak dari PERBINA, PERBANAS, HIMBARA, terus satu lagi ASBISINDO, kemudian dari ASBANDA. Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* Rapat Kerja kita pada hari ini berlangsung cukup dinamis dan kami berharap kesepakatan 7 hari ke depan itu dengan catatan apa-apa yang berkembang tadi ketika nanti jawabannya kami terima, kami akan berdiskusi kalau memang dipandang perlu oleh Anggota Komisi XI dan Pimpinan untuk kita mengundang untuk pendalaman lagi, barangkali ada hal-hal yang tidak ter-*cover* dalam jawaban itu. Barangkali itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)

Jakarta, 25 November 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**

